

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH DALAM MENANGGULANGI MASALAH  
KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**RISMA VIOLIN AYU NINGTYAS  
NPM : 167110798**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

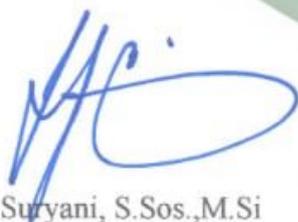
Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
NPM : 167110798  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan  
Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Pembimbing,



Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si



Hendry Andry, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
NPM : 167110798  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan  
Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Ketua,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Anggota,

Prof. Dr. Sufian H., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Indra Saffri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1686/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
N P M : 167110798  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru

**Struktur Tim :**

1. Hendry Andry, S.Sos., M.Si... Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Dr. Dia Meirina Surti, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

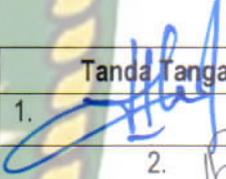
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1686/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Desember 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
NPM : 167110798  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : "80,33" ; Huruf : "B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
NPM : 167110798  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan  
Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Ketua,

Sekretaris,

  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

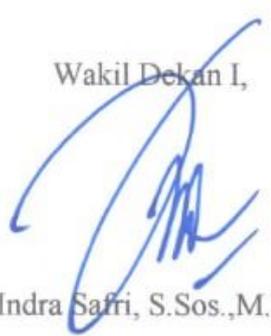
  
Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan-arahan, masukan, serta

sistematika penulisan dalam penyusunan Skripsi ini agar dapat di seminarkan.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
6. Kepada seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada Alm. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang tidak pernah lupa untuk selalu mendo'akan, mensupport, memfasilitasi penulis selama ini.
8. Kepada Kakak dan Abang kandung beserta suami dan istrinya serta Om Tedjo yang selalu mendo'akan, mensupport, dan memfasilitasi penulis selama perkuliahan ini.
9. Teman-teman tercinta dan seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2016 terkhusus kelas AP D yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis dapatkan ini

dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa, Bangsa dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Penulis,

Risma Violin Ayu Ningtyas



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>SK TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	20
1. Tujuan Penelitian .....	20
2. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB 2 : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Administrasi.....	21
2. Konsep Organisasi .....	26
3. Konsep Manajemen.....	28

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia .....	31
5. Konsep Manajemen Strategi .....	32
6. Konsep Manajemen Bencana .....	35
7. Konsep Mitigasi Bencana .....	39
8. Konsep Strategi .....	40
9. Konsep Lahan.....	45
B. Kerangka Pikir .....	45
C. Konsep Operasional .....	47
D. Operasional Variabel.....	48
E. Teknik Pengukuran .....	51
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel .....	58
D. Teknik Penarikan Sampel .....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisa Data.....	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	62
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	
1. Sejarah Kota Pekanbaru .....	64
2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau .....	66

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	68
4. Keadaan Demografis Kota Pekanbaru .....	70
B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru	
1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kota Pekanbaru).....	72
2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru .....	73
C. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru .....	74
D. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	77
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden	
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	83
2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	85
3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	87
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Perencanaan (Planning).....	89
2. Pengorganisasian (Organizing) .....	96
3. Kepemimpinan (Directing) .....	102
4. Pengkoordinasian (Coordinating) .....	107
5. Pengendalian (Controlling) .....	111
6. Pengawasan (Supervising) .....	115

7. Penganggaran (Budgeting).....	119
8. Keuangan (Financing).....	123
C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.....	127
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru ....	131
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>147</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru ..... 8
I.2	Bencana Kebakaran Lahan 01 Januari s/d 23 Februari 2020 Di Kota Pekanbaru ..... 9
I.3	Jumlah Anggota Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru ..... 14
II.1	Operasional Variabel Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru ..... 49
II.2	Skala Pengukuran dalam Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru ..... 51
II.3	Skala Pengukuran Variabel untuk Anggota Satuan Tugas BPBD dalam mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dadalam Menanggulangi Masalah Kekabakaran Lahan Di Kota Pekanbaru ..... 53
II.4	Skala Pengukuran Variabel untuk Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru ..... 54
II.5	Skala Pengukuran Indikator untuk Anggota Satuan Tugas mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru ..... 55
II. 6	Skala Pengukuran Indikator untuk Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru ..... 56
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru ..... 59
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru ..... 63

IV.1	Jumlah dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut dari 12 Kecamatan .....	69
IV.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan yang ada Di Kota Pekanbaru .....	71
IV.3	Daftar Nama Pegawai Beserta Jabatannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	75
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	84
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	86
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	88
V.4	Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Perencanaan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	91
V.5	Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Perencanaan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	92
V.6	Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengorganisasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru .....	97
V.7	Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengorganisasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	98
V.8	Distribusi Reponden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Kepemimpinan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	103
V.9	Distribusi Jawaban Reponden Masyarakat Terhadap Indikator Kepemimpinan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	104

V.10	Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengkoordinasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	108
V.11	Distribusi Jawaban Masyarakat Terhadap Indikator Pengkoordinasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	109
V.12	Distribusi Jawaban Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengendalian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	112
V.13	Distribusi Jawaban Masyarakat Terhadap Indikator Pengendalian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	113
V.14	Distribusi Jawaban Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengawasan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	116
V.15	Distribusi Jawaban Masyarakat Terhadap Indikator Pengawasan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	117
V.16	Distribusi Jawaban Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Penganggaran pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	120
V.17	Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Penganggaran Masyarakat pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	121
V.18	Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Keuangan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	124

V.19	Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Keuangan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	125
V.20	Rekapitulasi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas BPBD Tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	128
V.21	Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	130



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Penelitian Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru .....	46
IV.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar wawancara Penelitian Untuk Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru .....	148
2. Daftar wawancara penelitian untuk Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru .....	153
3. Daftar wawancara penelitian untuk Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	158
4. Daftar kuesioner penelitian untuk Anggota Satuan Tugas BPBD tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	163
5. Daftar kuesioner penelitian untuk Masyarakat tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	172
6. Rekap Telly data penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru .....	181
7. Surat Permohonan Rekomendasi Riset No. 1123/E-UIR/27-FS/2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau .....	182
8. Surat Rekomendasi No 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/39888 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau .....	183
9. Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/958/2021 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru .....	184
10. Surat Pemberian Izin Riset No 870/BPBD-Sekr./2481/2021 dari Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	185

11. SK Dekan Fisipol UIR No. 159/UIR-Fs/Kpts/2021 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi .....	186
12. Surat Keterangan Jurnal Online .....	187
13. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi .....	188
14. Sertifikat Baca Al-Qur'an .....	189



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Violin Ayu Ningtyas  
NPM : 167110798  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Maret 2022



Pelaku Pernyataan,

Risma Violin Ayu N

# STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI MASALAH KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh

**Risma Violin Ayu Ningtyas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pemantauan lainnya. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari fenomena yang terdapat didalam strategi yaitu masih kurangnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat sehingga masih adanya lahan yang terbakar dan lemahnya perkuatan sistem peringatan dini yang dilakukan oleh BPBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dan faktor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Anggota Satuan Tugas BPBD dan Masyarakat. Teknik pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert dengan pemberian nilai skor terhadap setiap indikator pengukuran. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari hasil kegiatan peneliti dari responden, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, ataupun dokumentasi resmi pemerintah yang di dapat dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa strategi yang tidak dijalankan sepenuhnya. Secara keseluruhan BPBD sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, namun kembali lagi kepada masyarakat yang masih suka mengelola lahan dengan cara membakar. Hal ini menyebabkan kebakaran lahan sering terjadi tiap tahunnya.

**Kata Kunci : Strategi, Kebakaran Lahan**

# **REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY STRATEGY IN OVERCOMING LAND FIRE PROBLEMS IN PEKANBARU CITY**

## **ABSTRACT**

**By**

**Risma Violin Ayu Ningtyas**

*The Regional Disaster Management Agency is an organization of regional apparatus within the Pekanbaru City government which carries out government affairs in the field of peace and public order, sub-disaster management affairs in Pekanbaru City and other monitoring tasks. The strategy of the Regional Disaster Management Agency in tackling the problem of profit fires in Pekanbaru City is still not optimal. This can be seen from the phenomena contained in the strategy, namely the lack of disaster education to the community so that there are still burned lands and the weak strengthening of the early reinforcement system carried out by BPBD. This study aims to determine the strategy of the Regional Disaster Management Agency in tackling the problem of land fires in Pekanbaru City and the factors causing it. The method used in this research is descriptive quantitative method. The population and samples in this study were the head of the Prevention and Preparedness Division, the head of the Emergency and Logistics Division, the head of the Rehabilitation and Reconstructions Division, members of the BPBD Task Force and the Community. The measurement technique used is a Likert Scale by assigning a score to each measurement indicator. The type of data used is primary data obtained from the results of research activities from respondents, while secondary data is in the form of books, or official government documentation obtained from the Office of the Regional Disaster Management Agency. For data collection, researches used questionnaires, interviews, observation and documentation. From the results of the research that has been carried out, the researches assessed and concluded that regarding the strategy of the Regional Disaster Management Agency in tackling the problem of land fires in Pekanbaru City, it was said to be well implemented, although there are still strategies that are not fully implemented. Overall BPBD had done its job optimally, but returned to the people who still like to manage land by burning. This causes land fires to occur frequently every year.*

**Keywords : Strategy, Land Fire**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pernyataan ini mempunyai makna, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana.

Secara definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan / puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Bencana-bencana tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah-langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, dari 497 kabupaten/ kota di Indonesia, Kota Pekanbaru berada pada posisi ke 365 dengan kelas resiko "sedang" pada skor 132,4 (kelas resiko tertinggi Cianjur-Jawa Tengah dengan skor 250, dan kelas resiko terendah Memberamo Tengah-Papua dengan skor 44).

Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BNPB di daerah didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, dan kabupaten/kota yang dipimpin langsung secara ex-officio oleh sekretaris daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan menindaklanjuti Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas , maka untuk mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka manusia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkolerasi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama kooperatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus, mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan ialah administrasi.

Organisasi sebagai unsur administrasi memberi pengertian bahwa di dalamnya ada suatu proses yang dimulai dari penyusunan bentuk dan pola usaha kerja sama, penggolongan kerja yang harus dijalankan, pembagian wewenang dari masing-masing pelaksana dan menentukan hubungan kerja sama yang seimbang serta tanggung jawab. Selain administrasi dan organisasi, manajemen juga dibutuhkan didalam organisasi. Manajemen disebut sebagai ilmu dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai seni. Dikatakan manajemen sebagai ilmu

adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang disertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk mempraktekkanya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pemantauan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, adapun tugas dan fungsi dalam rincian adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.

4. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi tugas penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain adanya tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, ada pula visi dan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru adalah **“Mengurangi Resiko Bencana dan Penanganan Darurat Bencana”**.

Dengan upaya pencapaian tujuan :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan resiko bencana.
2. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.
3. Terlaksananya fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sertakewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam system penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami kebakaran lahan dan hutan, dimana pada tahun 1997/1998 kebakaran hutan di Riau termasuk sebagai bencana Nasional (Karnowo, 1998). Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang setiap tahunnya menyumbang asap besar, tidak hanya diwilayah Indonesia akan tetapi hingga ke Negara tetangga. Untuk penanggulangan kebakaran, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak TNI/Polri. Sejauh ini, penanggulangan kebakaran masih ditangani melalui darat. Sementara melalui udara belum bisa dilakukan karena belum ada penetapan status siaga.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah  $\pm 632 \text{ km}^2$ . Di wilayah Kota Pekanbaru terdapat titik tertinggi lahan gambut yang berpotensi terjadinya kebakaran, yaitu berada di Kecamatan :

1. Payung Sekaki
2. Tampan
3. Rumbai
4. Rumbai Pesisir
5. Bukit Raya
6. Marpoyan Damai
7. Tenayan Raya

Tabel I.1 : Tabel Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru.

NO	KECAMATAN	BULAN												LUAS	RESPON TIME
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS T	SEPT	OKT	NOV	DES		
1.	TENAYAN RAYA	-	-	2 Kali	-	-	-	1 Kali	8 Kali	3 Kali	-	-	-	33,2105 Ha	45 Menit
2.	TAMPAN	2 Kali	3 Kali	3 Kali	1 Kali	-	-	5 Kali	8 Kali	11 Kali	2 Kali	1 Kali	-	15,522 Ha	25 Menit
3.	RUMBAI	-	1 Kali	6 Kali	-	2 Kali	-	2 Kali	4 Kali	3 Kali	-	-	-	47,1075 Ha	40 Menit
4.	RUMBAI PESISIR	-	-	3 Kali	-	-	-	1 Kali	Nihil	1 Kali	-	-	-	13,5265 Ha	40 Menit
5.	PAYUNG SEKAKI	1 Kali	7 Kali	7 Kali	1 Kali	2 Kali	-	4 Kali	9 Kali	14 Kali	14 Kali	1 Kali	-	85,5455 Ha	35 Menit
6.	MARPOYAN DAMAI	-	-	2 Kali	-	-	-	1 Kali	6 Kali	9 Kali	1 Kali	-	-	4,9215 Ha	20 Menit
7.	BUKIT RAYA	-	-	-	-	-	-	5 Kali	6 Kali	31 Kali	2 Kali	-	-	57,937 Ha	20 Menit
8.	SUKAJADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SENAPELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	SAIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	PEKANBARU KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	LIMA PULUH	-	-	1 Kali	-	-	-	-	-	-	1 Kali	-	-	0,56 Ha	40 Menit
	<b>JUMLAH</b>	<b>3 Kali</b>	<b>11 Kali</b>	<b>24 Kali</b>	<b>2 Kali</b>	<b>4 Kali</b>	<b>-</b>	<b>19 Kali</b>	<b>41 Kali</b>	<b>72 Kali</b>	<b>20 Kali</b>	<b>2 Kali</b>	<b>-</b>	<b>258,3305 Ha</b>	<b>-</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel I.2 : Tabel Bencana Kebakaran Lahan dari 01 Januari—23 Februari Tahun 2020 Di Kota Pekanbaru.

NO	KECAMATAN	BULAN		LUAS	RESPON TIME
		JANUARI	FEBRUARI		
1.	TENAYAN RAYA	-	1 Kali	0,225 Ha	45 Menit
2.	TAMPAN	3 Kali	1 Kali	1,2 Ha	25 Menit
3.	RUMBAI	1 Kali	-	2 Ha	40 Menit
4.	RUMBAI PESISIR	1 Kali	-	0,025 Ha	40 menit
5.	PAYUNG SEKAKI	2 Kali	-	0,3225 Ha	35 menit
6.	MARPOYAN DAMAI	-	-	-	-
7.	BUKIT RAYA	1 Kali	3 Kali	1,32 Ha	20 Menit
8.	SUKAJADI	-	-	-	-
9.	SENAPELAN	-	-	-	-
10.	SAIL	-	-	-	-
11.	PEKANBARU KOTA	-	-	-	-
12.	LIMA PULUH	-	-	-	-
13.	KAMPAR	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8 Kali</b>	<b>5 Kali</b>	<b>5,0925 Ha</b>	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa total kejadian kebakaran lahan yang terjadi sepanjang tahun 2019 mencapai 198 kali dan luas lahan yang terbakar dari keseluruhan sebesar 258,3305 Ha. Kebakaran lahan tidak hanya terjadi ditahun 2019 tetapi juga terjadi di awal bulan Januari dan Februari tahun 2020 di beberapa daerah. Namun, lahan yang terbakar tidak separah dan sebanyak di tahun 2019 sebelumnya. Total kejadian sebanyak 13 kali dan luas lahan yang terbakar yakni 5,0925 Ha .

Sebelumnya, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kebakaran lahan dan hutan di Riau mengalami penurunan dengan jumlah lahan yang terbakar pada tahun 2015 seluas 183. 809 Ha, dan menurun lagi pada tahun 2016 seluas 85. 220 Ha, dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.841 Ha.

Penyebab terjadinya kebakaran lahan dapat diartikan sebagai pemicu terjadinya api yang menyebabkan api liar (*wildfire*) atau kebakaran. Syaufina dan Hafni (2018) menyatakan iklim merupakan salah satu faktor alami yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kebakaran hutan dan lahan, karena kondisi iklim dapat memengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar tingkat permukaan, banyaknya oksigen yang ada dan kecepatan penyebaran api. Pemicu terjadinya api adalah akibat proses kimia pembakaran yang sengaja dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Berbagai aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar lahan dengan menggunakan api, tidak lepas dari hubungannya dengan mata pencaharian lainnya. Api seringkali bermunculan mulai dari area lahan hingga ke pinggir-pinggir jalan untuk tujuan membakar rumput yang sudah rimbun. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama. Hal yang lebih ironis lagi pembakaran telah rutin

dilakukan oleh pemilik-pemilik lahan, baik di lahan basah maupun kering dengan tujuan hanya untuk mencegah lahan menjadi hutan atau sekedar menunjukkan kepemilikan.

Selain itu menurut Akbar (2016) penyebab kebakaran yang dilakukan oleh manusia yaitu : 1) konversi lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain; 2) pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak terkontrol, seperti pembukaan perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat; 3) pembakaran untuk menunjukkan penguasaan lahan oleh masyarakat setelah terambil perusahaan dan bahkan pembakaran untuk merambah areal hutan.

Salah satu tindakan manusia yang tidak bijaksana yang berhubungan dengan bahaya kebakaran adalah melakukan perladangan secara berpindah-pindah. Budaya senang membakar setiap menjelang musim hujan nampaknya sulit untuk dihilangkan. Kerusakan akibat kebakaran yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap ekosistem. Pencemaran lingkungan lainnya yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan adalah pemanasan global. Dampak negatif pada lingkungan yaitu penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang memperpendek jarak pandang sehingga mengganggu transportasi, dan dampak bagi kesehatan adalah timbulnya asap yang mengganggu kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil, anak balita seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia, iritasi mata dan kulit. Sementara dampak ekonomi antara lain meliputi dibatalkannya jadwal transportasi darat, air, udara, hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan

yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat, turunnya produksi industri dan perkantoran, serta anjloknya bisnis pariwisata (Rasyid, 2014).

Kabut asap juga menjadi salah satu efek pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan di Kota Pekanbaru. Kabut asap menyebabkan penglihatan terganggu dan menyebabkan siapa saja yang menghirupnya akan terkena penyakit saluran pernapasan seperti penyakit *pneumonia* dan ISPA. Di tahun 2019 tercatat 14.829 orang yang terkena penyakit ISPA di Kota Pekanbaru karena kualitas udara yang buruk akibat kabut asap.

Adapun informasi dari Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : MAK/01/XII/2019 Tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan antara lain sebagai berikut :

1. Kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
2. Apabila menemukan titik api dilahan pribadi segera laporkan kepada Pemda setempat, TNI/Polri untuk dilakukan pemadaman secara bersama-sama.
3. Pelaku pembakaran lahan dan hutan di ancam Pasal berlapiis berdasarkan :
  - a. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 huruf D “Setiap orang dilarang membakar hutan”
    - 1) Pasal 78 Ayat (3), ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

2) Pasal 78 Ayat (4), ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.

b. Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 48 Ayat (1) dipidana 10 tahun denda 10 milyar.

c. Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 110 di pidana 3 tahun s/d 10 tahun denda 3 milyar s/d 10 milyar.

d. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Perusakan Hutan. Pasal 92 Ayat (2) terhadap korporasi di pidana 8 s/d 20 tahun denda 20 milyar s/d 50 milyar.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 187 diancam pidana selama 12 tahun.

b. Pasal 188 diancam pidana selama 5 tahun.

c. Pasal 189 diancam pidana selama 7 tahun.

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, guna kepentingan bersama-sama. (dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Desember 2019 oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau).

Adapun faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat menanggulangi masalah kebakaran lahan ini antara lain :

1. Letak sumber air yang sangat jauh dari tempat lahan terbakar tersebut, sehingga menyulitkan anggota satuan tugas BPBD dalam memadamkan kebakaran.

2. Alat-alat pemadam kebakaran sangat sulit dibawa ke lokasi kejadian apabila letaknya yang sangat jauh di pedalaman sehingga susah dilewati oleh aset kendaraan sehingga membuat anggota harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat lokasi kejadian tersebut.

Sarana prasarana yang digunakan sewaktu pemadaman kebakaran yaitu mobil pemadam kebakaran, selang hydrant/fire hose yang berfungsi untuk menyalurkan air ke sumber api yang didukung oleh tekanan dari pompa hydrant dan fire hose pack atau ransel selang pemadam kebakaran. BPBD berjumlah 47 orang anggota satgas dan dalam 1 regu dibagi menjadi 12 orang.

**Tabel 1.3 Jumlah Anggota Satuan Tugas BPBD**

<b>Personil BPBD</b>	<b>Anggota/Regu</b>
Regu A	12 Orang
Regu B	12 Orang
Regu C	12 Orang
Regu D	11 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>47 Orang Anggota</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kodim, Polresta, dan Kelurahan RT/RW.

Dalam mengatasi masalah kebakaran lahan sangat diperlukan manajemen bencana untuk mengetahui pengelolaan bencana yang terjadi. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-

tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Menurut Neil Grigg (dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif 1998) fase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana”, meliputi :

1. Perencanaan (*planning*), meliputi : (1) identifikasi masalah bencana atau sasaran/tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan; (2) pengumpulan data primer dan sekunder; (3) penentuan metode yang digunakan; (4) investigasi, analisis atau kajian; (5) penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan (stage). Sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi.
2. Pengorganisasian (*organizing*). Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang (pihak) yang masuk dalam suatu kesatuan/kelompok organisasi.
3. Kepemimpinan (*directing*). Lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward and punishment, konselor, dan pelatihan kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan.
4. Pengkoordinasian (*coordinating*). Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia (SDM) agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan

sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal yaitu antar bagian yang mempunyai kedudukan serta maupun vertikal yaitu antar suatu bagian dengan bagian di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan struktur yang ada.

5. Pengendalian (*controlling*). Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sisi-sisi waktu (*time*), ruang (*space*), biaya (*cost*) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan atau bagian dari kegiatan itu bekerja, untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis dan atau darurat.
6. Pengawasan (*supervising*). Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya dan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, target dan sasaran dan juga berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar.
7. Penganggaran (*budgeting*). Dalam hal pengelolaan bencana, penganggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada.
8. Keuangan (*financing*). Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi/organisasi sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program.

Selain dari pengelolaan bencana yang sudah dipaparkan diatas, untuk menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, BPBD Kota Pekanbaru memiliki strategi yang dilakukan agar berkurangnya kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Adapun strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

(1) Perencanaan berbasis mitigasi bencana.

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana. Tindakan mitigasi ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah :

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan
- b. Membuat peta rawan bencana dan pemetaan masalah
- c. Pembuatan pedoman/standar/prosedur
- d. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
- e. Pengkajian karakteristik bencana dan analisis resiko bencana

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain :

- a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb
- b. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat
- c. Pindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman
- d. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat
- e. Perencanaan daerah penampung sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.

(2) Perkuatan sistem peringatan dini

Salah satu poin penting dalam pencegahan kebakaran lahan adalah adanya sistem peringatan dini terutama saat masa rawan. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. BPBD melakukan sistem peringatan dini yang merupakan elemen utama pengurangan risiko bencana untuk mencegah hilangnya nyawa dan mengurangi dampak ekonomi dan material dari bencana. Peringatan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi rawan kebakaran lahan dan hutan dan larangan membakar lahan. Secara formal peringatan dini tersebut juga dilakukan melalui penetapan status siaga darurat oleh BPBD yang kemudian membentuk satuan tugas (satgas).

(3) Edukasi kebencanaan untuk semua.

Adanya pengetahuan dan edukasi yang diberikan ke masyarakat bisa mengurangi dampak bencana. Pengetahuan akan kebencanaan tidak diberikan untuk membuat ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat, namun sebagai langkah kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang harus diciptakan agar masyarakat bisa hidup dengan harmonis tanpa merasakan dampaknya. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak atau mengurangi risiko bencana kebakaran yang terjadi. Masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana kebakaran lahan.

Walupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah memiliki strategi untuk mengatasi kebakaran lahan, namun tetap saja strategi yang digunakan belum sepenuhnya diterapkan kepada masyarakat. Seperti edukasi kebencanaan dan perkuatan sistem peringatan dini yang masih lemah.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan beberapa fenomena yaitu :

1. Masih kurangnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat sehingga masih adanya kebakaran lahan yang terjadi.
2. Lemahnya perkuatan sistem peringatan dini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyebab kebakaran lahan.

### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik yang dipelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat Praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Manfaat Akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti selanjutnya dan umumnya bagi pembaca.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam menulis karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem.

Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

#### 1. Konsep Administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas , maka untuk mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka manusia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkolerasi dengan semakin

meningkatnya kualitas dan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama kooperatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempetahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus, mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan ialah administrasi.

Seacara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”. Serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan.

Menurut The Liang Gie mengatakan “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (Gie, 1965: 8).

Sedangkan menurut Leonardo D. White, administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam White, 1955: 1).

Menurut Siagian (dalam Wirman Syafri (2012:9) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana prasarana

tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. (Sondang P.Siagian 1992:2 dalam Zulkifli & Moris A. Yogya 2009:11).

Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin. (Edward H. Litchfield 1956:1 dalam Inu Kencana Syafiee 2010:25).

Adapun administrasi menurut Stephen P. Robbins adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain (Robbins, 1983:9).

Zulkifli terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membukakan mata kita untuk lebih melihat terhadap administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-mengetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber manusianya maupun sumberdaya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu bisa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain:

- a. Man, yaitu manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam organisasi tersebut berkualitas maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. Money, yaitu uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. Method, yaitu metode atau cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. Machine, yaitu mesin. Mesin yang dimaksud disini adalah perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. Material, yaitu bahan atau alat. Bahan atau alat berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksu

disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.

- f. Market, yaitu pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Konsep 6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan.

Menurut Hadawi Nawawi (1990:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982: 39-40), administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian pelayanan kegiatan tata usaha kantor seperti surat menyurat, ketik mengetik, dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh BPBD Kota Pekanbaru agar mampu melaksanakan administrasi dengan sebaik-baiknya. Dengan administrasi yang baik tentunya BPBD Kota Pekanbaru bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.

## 2. Konsep Organisasi

Menurut Stephan P. Robbins (1986:19) menyebutkan bahwa organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang yang berfungsi atas dasar yang relative kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan-tujuan bersama.

Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengatakan bahwa Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives).

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagipencapaian tujuan (Wirman Syafri, 2012:12).

Pradjudi Atmosudirdjo (1976:1), organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Dwight Waldo, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu system (Waldo, 1955:18).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formil terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang

yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.. (Siagian 1985:7).

Dari sejumlah definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan tempat terselenggarakannya administrasi yang di dalamnya terdapat pola aktivitas kerjasama melalui hubungan antar individu maupun kelompok yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi sebagai unsur administrasi memberi pengertian bahwa di dalamnya ada suatu proses yang dimulai dari penyusunan bentuk dan pola usaha kerja sama, penggolongan kerja yang harus dijalankan, pembagian wewenang dari masing-masing pelaksana dan menentukan hubungan kerja sama yang seimbang serta tanggung jawab.

Menurut Winardi (2009:15) Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerjasama dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana organisasi sendiri merupakan tempat/wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas serta tempat berlangsung berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa organisasi BPBD Kota Pekanbaru seharusnya mampu dalam menempatkan diri untuk dapat menghadapi tantangan

lingkungan yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Apabila BPBD Kota Pekanbaru dapat menghadapi tantangan yang ada, maka organisasi tersebut bisa dinilai sebagai organisasi kuat, berkompeten, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Siagian (1985:5) artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan.

Menurut George R. Terry (dalam Sedarmayanti 2014: 1) manajemen adalah proses khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

George R. Terry (2014:9) menjelaskan “Manajemen adalah sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*”. Kemudian adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (2014:17) yang dikenal sebagai POAC yaitu sebagai berikut :

#### a. *Planning* (Perencanaan)

Adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. *Planning* mencakup kegiatan

pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Mencakup berbagai komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

Menurut James A.F Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. (dalam Sedarmayanti 2014:1).

Frans Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif.

Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pergantian manajemen.

Menurut Ensiklopedia Administrasi (dalam Sjamsiar Sjamsuddin 2016: 21) manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi (Made Devi Wedayanti, 2018:2).

Menurut The Liang Gie (dalam Sjamsiar Sjamsuddin 2016:21) manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan karyawan-karyawan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerja sama yang ditentukan benar-benar dapat tercapai.

Dari definisi manajemen diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk mengatur atau memmanage yang didalamnya terdapat serangkaian aktivitas atau kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) untuk menentukan serta mencapai sasaran, tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut.

#### 4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (*human resources*) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. (Samsudin, 2006: 22).

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan (Suwatno & Donni, 2014:16).

Menurut Rival dan Sagala (2009: 1) manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian Amirullah (2004:206) mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, intregasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Danang Sunyoto (dalam Burhanuddin 2015: 29) manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan pada manajemen manusia didasarkan pada nilai manusia dalam

hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi ditentukan oleh manajemen manusia.

Menurut Moses N. Kiggundu (1989) yang melihat manajemen SDM dalam perspektif makro: MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dari sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.

Menurut MARIHOT TUA EFFENDI HARIANDJA (2005), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi. (dalam Burhanuddin dan Nur Arianto 2015: 29).

Menurut Sedarmayanti (2007:13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dalam penilaian.

Dari pemaparan definisi sumber daya manusia diatas, dalam hal ini BPBD Kota Pekanbaru bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik dan jujur dan berkualitas. Sehingga dalam bekerja para SDM/pegawai BPBD Kota Pekanbaru bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi.

## **5. Konsep Manajemen Strategi**

Menurut Hunger dan Wheelan (dalam Erislan 2018 : 6) manajemen strategi sebagai suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan

kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Tercakup didalamnya mengenali dan menganalisa lingkungan, memformulasi strategi, mengimplementasikan strategi dan melakukan evaluasi berikut pengendalian.

Menurut David R. Fred (2012 : 5) manajemen strategi adalah suatu seni dan pengetahuan dalam merencanakan, menerapkan serta menilai keputusan-keputusan pemimpin dalam upaya pencapaian suatu tujuan yang diinginkan.

Menurut Fred R. David (2010 : 23) manfaat utama dari manajemen strategi adalah untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional.

Menurut Jauch dan Glueck (dalam Amirullah 2015 : 5) manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi.

Menurut Pearch dan Robinson (dalam Erislan 2018 : 7) manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Dalam Sedarmayanti (2014 : 3) menurut J. David Hunger dan Thomas Weelan manajemen strategi adalah kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam jangka panjang yang meliputi pengamatan lingkungan, perencanaan, penerapan dan penilaian serta pengendalian.

Menurut Sedarmayanti (2014 : 3) manajemen adalah rangkaian suatu proses dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersifat secara dasar dan menyeluruh yang disertai dengan cara pelaksanaannya dibuat oleh pimpinan dan diterapkan oleh seluruh bawahan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Karakteristik Manajemen Strategi, yaitu :

Manajemen strategi selalu memberikan suatu sikap yang senantiasa melihat akan perubahan disuatu lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap suatu penerapan yang dilakukan dan dapat melakukan tujuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Maka karakteristik manajemen strategi adalah :

1. Memiliki sifat jangka panjang
2. Memiliki sifat yang dinamik
3. Sesuatu yang berpadu pada manajemen operasional
4. Adanya monitoring yang dilakukan oleh manajer puncak
5. Dilakukan untuk masa depan atau masa yang akan datang
6. Kegiatannya harus didukung oleh sumber daya ekonomi yang tersedia

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah perusahaan mencapai tujuan dimasa yang akan datang (Umar, 2001:7).

Menurut Andrew dan Chaffe dalam Umar 2001:9), strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan. Proses manajemen strategi berusaha mengorganisasikan informasi kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi tidak menentu.

Menurut David (2009:5), manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya.

Dari pemaparan diatas dapat ditelah bahwa dengan adanya manajemen strategi ini bisa mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategi. Manajemen strategi memberikan fondasi dasar untuk pengambilan keputusan dalam organiasi.

#### **6. Konsep Manajemen Bencana**

Manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah “suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana”.

Manajemen bencana (dalam Anies 2018:123) merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk 1) mencegah kehilangan jiwa 2) mengurangi penderitaan manusia 3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko 4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Menurut University of Wisconsin (dalam Anies 2018:124) mendefinisikan manajemen bencana sebagai *“the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situation and to provide a framework of helping at-risk persons to avoid or recover from the impact of disaster. Disaster management deals with situation that occurs prior to, during, and after the disaster”*. Serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Sementara Universitas British Columbia mendefinisikan manajemen bencana sebagai proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) dalam rangka menyusun rencana untuk menghadapi bencana.

Menurut Abraham 2001 (dalam Anies 2018:132) manajemen bencana merupakan seperangkat rencana, prosedur, sumberdaya, personal dan berbagai hubungan, yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh bahaya, keadaan darurat dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Nurjannah (2012:42) manajemen bencana sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan. Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures)

terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan.

Menurut Prajudi AtmoSudirdjo dalam (Manullang, 2012:3) fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: perencanaan atau *planning*, pengorganisasian atau *organizing*, pengimplementasian atau *directing*, serta pengendalian dan pengawasan. Menurut Neil Grigg (dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif 1998) fase utama dari fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana”, meliputi :

1. Perencanaan (*planning*), meliputi : (1) identifikasi masalah bencana atau sasaran/tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan; (2) pengumpulan data primer dan sekunder; (3) penentuan metode yang digunakan; (4) investigasi, analisis atau kajian; (5) penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan (*stage*). Sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi.
2. Pengorganisasian (*organizing*). Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang (pihak) yang masuk dalam suatu kesatuan/kelompok organisasi.
3. Kepemimpinan (*directing*). Lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward and punishment, konselor, dan pelatihan kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*). Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia (SDM) agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal yaitu antar bagian yang mempunyai kedudukan serta maupun vertikal yaitu antar suatu bagian dengan bagian di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan struktur yang ada.
5. Pengendalian (*controlling*). Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sisi-sisi waktu (*time*), ruang (*space*), biaya (*cost*) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan atau bagian dari kegiatan itu bekerja, untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis dan atau darurat.
6. Pengawasan (*supervising*). Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya dan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, target dan sasaran dan juga berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar.
7. Penganggaran (*budgeting*). Dalam hal pengelolaan bencana, penganggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada.
8. Keuangan (*financing*). Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan

institusi/organisasi sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program.

## 7. Konsep Mitigasi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi adalah tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Mitigasi Bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana baik secara struktur maupun fisik melalui pembangunan fisik alami atau buatan maupun nonstruktur (nonfisik) melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB : 2012) mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Mitigasi bencana ialah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang

sudah diketahui dan proses perencanaan untuk respon terhadap bencana yang betul-betul terjadi (Maryani:2002).

Dari pemaparan mengenai mitigasi bencana diatas dapat disimpulkan bahwa mitigasi merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan resiko bencana terhadap masyarakat. Maka dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukan mitigasi tersebut dengan baik untuk mengurangi resiko bencana semaksimal mungkin.

### **8. Konsep Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 763), strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu “Stategos” yang artinya adalah “Kemenangan”. Sehingga stratgei adalah rencana dalam waktu jangka panjang, yang diikuti oleh suatu tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Alison dan Kaye (2004: 3), strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang di ambil oleh organisasi. Strategi juga merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Chandler dalam Rangkuti (2009:3) setrategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Strategi menurut Glueck dan Jauch (dalam sedarmayanti 2014: 2) adalah rencana yang telah disatukan dan dihubungkan melalui suatu keunggulan dari tantangan dilingkungan sekitar dan dirancang untuk memastikan tujuan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh suatu organisasi.

Menurut Supriyono (1990: 8) (dalam Amirullah 2015:4) strategi adalah suatu kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang dipelrukan.

Menurut Robinson dan Pearce (1997: 2) (dalam Amirullah 2015: 4) strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Menurut Fred R David (2010: 18) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Dalam menilai strategi, ada 3 indikator penilaian yang harus dilakukan :

1. Perumusan strategi, merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam suatu organisasi sehingga mengetahui cara atau langkah apa saja yang akan dilakukan kedepannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Penerapan strategi, merupakan tahap pelaksanaan dari strategi yang telah dirancang dengan mengalokasikan sumber daya agar strategi atau langkah yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
3. Penilaian strategi, merupakan hasil dari strategi atau langkah yang dilakukan, kemudian dilihat apakah strategi yang dilakukan berhasil atau tidaknya.

Menurut Marrus dalam Umar (2001: 31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Prahalaad dalam Umar, 2001: 31).

Menurut William J. Stanton (dalam Amirullah 2015: 4) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Rivai (2015: 9) strategi merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif). Strategi harus membuat semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif).

Menurut Jones (J. Winardi, 2003: 106), strategi merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-

tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.

Menurut Andrews dalam Kuncoro (2006:1), strategi merupakan pola sasaran tujuan, kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang telah dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2009:4), mengemukakan strategi merupakan : “tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.

Menurut Jatmiko (2003:4), strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumberdaya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan pada definisi tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi, yaitu :

1. Lingkungan eksternal
2. Sumberdaya dan kemampuan internal
3. Tujuan yang akan dicapai

Hax dan Maljuf, (1991:71) mencoba menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

- a. Strategi ialah pola leputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
- b. Strategi menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumberdaya;
- c. Strategi menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- d. Strategi mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
- e. Strategi meliatkan semua tingkat hierarki dan organisasi..

Dengan definisi ini, menurut perumus tadi strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Tujuan pemilihan strategi adalah untuk menjamin ketepatan pencapaian sasaran. Suatu rancangan strategi dapat dipilih untuk menutup kesenjangan dalam mencapai sasaran. Sifat kesenjangan itu sendiri juga sangat situasional. Kalau kesenjangan akibat prestasi dimasa lampau yang sangat buruk, pengurangan lebih mungkin dilakukan bila kesenjangan itu besar sebagai akibat dari peluang lingkungan yang diharapkan, maka akan lebih tepat bila dilakukan ekspansi.

## 9. Konsep Lahan

Menurut Noor (2006: 98), Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu.

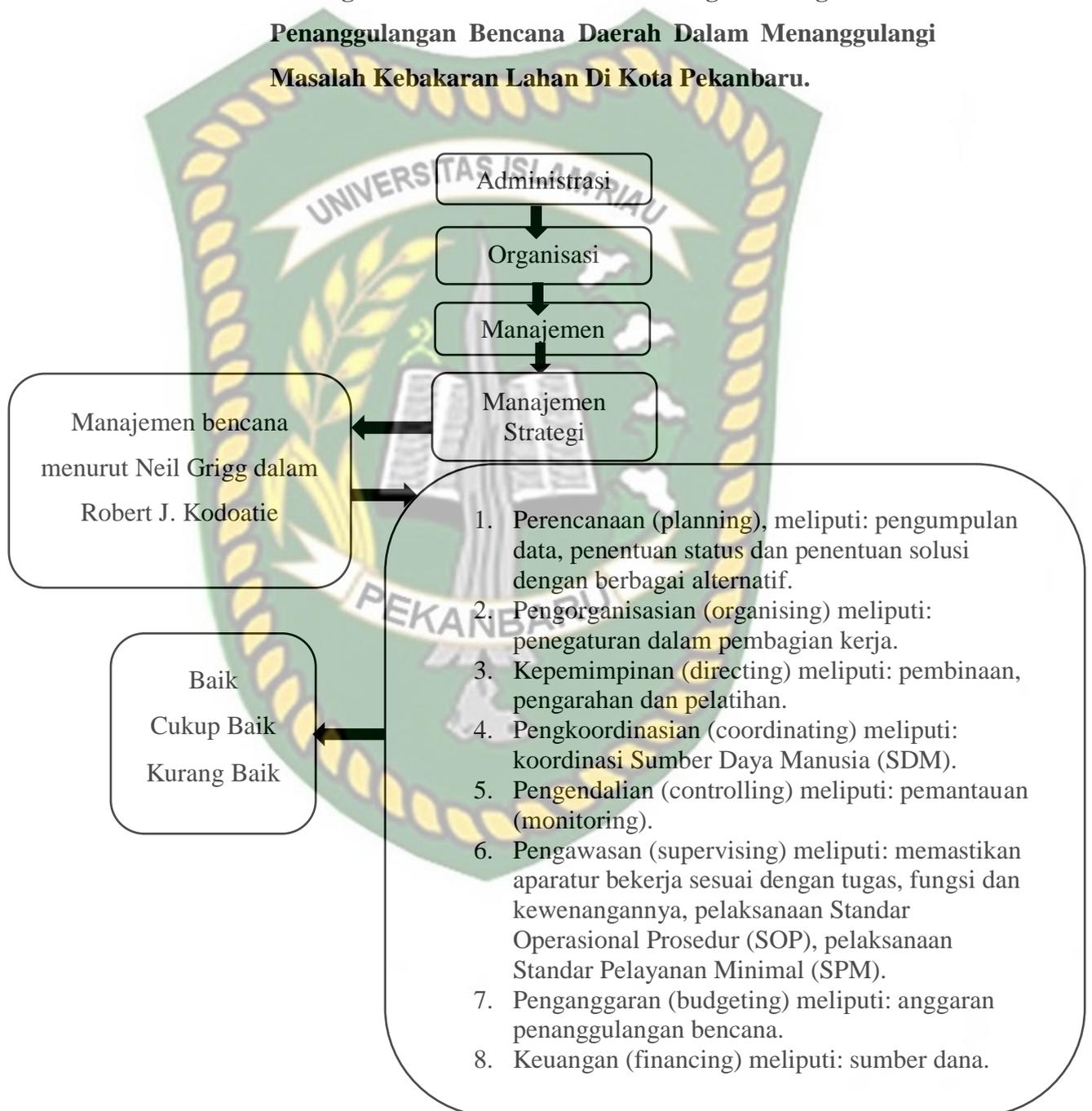
Lahan adalah permukaan bumi dengan kekayaan berupa tanah, batuan, mineral, benda cair dan gas yang terkandung di dalamnya. Lahan di permukaan bumi terbentang mulai dari wilayah pantai sampai daerah pegunungan (Gatot Hermanto:67). Secara lebih rinci, istilah lahan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklid yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973, dan FAO: 1976).

### B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru” maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dari konsep manajemen strategi menurut Teori (Jauch dan Glueck (dalam Amirullah 2015 : 5) dan 8 indikator yang mendukung dari Manajemen Bencana menurut Neil Grigg penulis mengambil ke delapan indikator tersebut sebagai

indikator yang dijadikan ukuran dalam skripsi ini. Delapan indikator tersebut bisa di lihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.**



*Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2021.*

### C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagipencapaian tujuan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan.
4. Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi (Jauch dan Glueck (dalam Amirullah 2015 : 5).
5. Manajemen bencana menurut Neil Grigg dalam Robert J. Kodoatie, meliputi : 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organising), 3) kepemimpinan (directing), 4) pengkoordinasian (coordinating), 5)

pengendalian (controlling), 6) pengawasan (supervising), 7) penganggaran (budgeting), 8) keuangan (fiancing).

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pemantauan lainnya.
7. Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokkan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian adalah “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru”, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Manajemen Strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi (Jauch dan Glueck (dalam Amirullah 2015 : 5). Maka di ambil indikator dari manajemen bencana yaitu :</p> <p>Menurut Neil Grigg (dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif 1998) fase utama dari fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana”, meliputi : perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran, keuangan</p>	<p>Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.</p>	1. Perencanaan (planning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Penentuan status</li> <li>c. Penentuan solusi dengan berbagai alternatif</li> </ul>	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pengorganisasian (organizing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan pembagian kerja</li> <li>b. Pembagian tugas dan fungsi</li> <li>c. Pengelompokkan fasilitas</li> </ul>	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kepemimpinan (directing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan pegawai</li> <li>b. Pengarahan pegawai</li> <li>c. Pelatihan pegawai</li> </ul>	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pengkoordinasian (coordinating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerasama Sumber Daya Manusia (SDM) didalam organisasi</li> <li>b. Kerjasama terhadap masyarakat</li> <li>c. Kerjasama dengan instansi luar organisasi</li> </ul>	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Pengendalian (controlling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan (monitoring) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>b. Pengawasan terhadap Sumber daya Manusia</li> </ul>	Baik Cukup Baik Kurang Baik

			(SDM) c. Evaluasi (monitoring) terhadap SDM	
		6. Pengawasan (supervising)	a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya. c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		7. Penganggaran (budgeting)	a. Anggaran penanggulangan bencana kebakaran lahan b. Pengeluaran anggaran pada penanggulan bencana kebakaran lahan c. Dana yang diperoleh	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		8. Keuangan (financing)	a. Sumber dana b. Pengelolaan keuangan c. Instansi yang membantu terkait keuangan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.

### E. Teknik Pengukuran

Adapun pengukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator yaitu menggunakan skala likert, yang mana indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Kemudian untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang diberikan skor, sebagai berikut :

**Tabel II.2 : Skala Pengukuran dalam Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru**

No	Skala Pengukuran	Skor
1	Baik	3
2	Cukup Baik	2
3	Kurang Baik	1

*Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021.*

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat tiga skala pengukuran dengan bobot skor pada masing-masing item sebagai penentuan hasil penelitian yaitu baik dengan bobot skor 3, cukup baik dengan bobot skor 2, dan kurang baik dengan bobot skor 1. Kemudian setelah mengetahui bobot skor dari setiap skala pengukuran maka selanjutnya dihitung dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan kemudian dicari interval kriteria penilaian dengan rumus sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran Variabel

*Rumus :*

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Skor Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Keterangan :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

Kemudian berikut ini merupakan skala pengukuran variabel untuk beberapa kelompok responden yaitu :

**1. Responden Anggota Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dihitung :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 24 \times 30 = 2.160$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 24 \times 30 = 720$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Interval} = \frac{2.160 - 720}{3}$$

$$\text{Interval} = \frac{1.440}{3}$$

$$\text{Interval} = 480$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan dengan Responden Anggota Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berjumlah 30 orang dan 24 pertanyaan yang diperoleh untuk Responden dengan total skor tertinggi 2.160 dan total skor terendah 720 dengan jarak interval 480. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Tabel II.3 : Skala Pengukuran Variabel untuk Anggota Satuan Tugas BPBD mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Baik	3	1.680-2.160
Cukup Baik	2	1.200-1.679
Kurang Baik	1	720-1.199

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel II.3 dapat ditelaah bahwa skala pengukuran variabel pada kategori baik dengan bobot skor 3 memiliki rentang skor 1.680-2.160, pada kategori cukup baik dengan bobot skor 2 memiliki rentang skor 1.200-1.679 dan pada kategori kurang baik dengan bobot skor 1 memiliki rentang skor 720-1.199. Skala pengukuran variabel digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian melalui tanggapan responden dari kuisioner yang telah disebarakan peneliti.

## 2. Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Dihitung :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 24 \times 10 = 720$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 24 \times 10 = 240$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Interval} = \frac{720 - 240}{3}$$

$$\text{Interval} = \frac{480}{3}$$

$$\text{Interval} = 160$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi

Masalah Kebakaran Lahan dengan Responden masyarakat yang berjumlah 10 orang dan 24 pertanyaan yang diperoleh untuk Responden dengan total skor tertinggi 720 dan total skor terendah 240 dengan jarak interval 160. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Tabel II.4 : Skala Pengukuran Variabel untuk Masyarakat mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Baik	3	560-720
Cukup Baik	2	400-599
Kurang Baik	1	240-399

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel II.4 dapat ditelaah bahwa skala pengukuran variabel pada kategori baik dengan bobot skor 3 memiliki rentang skor 560-720, pada kategori cukup baik dengan bobot skor 2 memiliki rentang skor 400-599 dan pada kategori kurang baik dengan bobot skor 1 memiliki rentang skor 240-399. Skala pengukuran variabel digunakan untuk menentukan hasil dari penelitian melalui tanggapan responden dari kuisisioner yang telah disebarakan peneliti.

## 2. Pengukuran Indikator

### 1. Responden Anggota Satuan Tugas BPBD

Dihitung :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 3 \times 30 = 270$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 3 \times 30 = 90$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Interval} = \frac{270 - 90}{3}$$

$$\text{Interval} = \frac{180}{3}$$

$$\text{Interval} = 60$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap indikator dari strategi badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan dengan Responden Anggota Satuan Tugas yang berjumlah 30 orang dan 3 pertanyaan yang diperoleh untuk responden dengan total skor tertinggi 270 dan total skor terendah 90 dengan jarak interval 60. Dengan demikian, penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Tabel II.5 : Skala Pengukuran Indikator untuk Anggota Satuan Tugas mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Baik	3	210-270
Cukup Baik	2	150-209
Kurang Baik	1	90-149

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel II.5 dapat ditelaah bahwa dalam skala pengukuran indikator pada kategori Baik dengan bobot 3 mempunyai rentang skala 210-270, kemudian pada kategori Cukup Baik dengan bobot 2 mempunyai rentang skala 150-209, dan pada kategori Kurang Baik dengan bobot 1 mempunyai rentang skala 90-149. Dalam variabel pelaksanaan memiliki 8 indikator yang masing-masing memiliki 3 item penilaian.

## 2. Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Dihitung :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 3 \times 10 = 90$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 3 \times 10 = 30$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Interval} = \frac{90 - 30}{3}$$

$$\text{Interval} = \frac{60}{3}$$

$$\text{Interval} = 20$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap indikator dari strategi badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan dengan Responden masyarakat Kota Pekanbaru yang berjumlah 10 orang dan 3 pertanyaan yang diperoleh untuk responden dengan total skor tertinggi 90 dan total skor terendah 30 dengan jarak interval 20. Dengan demikian, penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Tabel II.6 : Skala Pengukuran Indikator untuk Masyarakat mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

Skala Pengukuran	Bobot Skor	Rentang Skala
Baik	3	70-90
Cukup Baik	2	50-69
Kurang Baik	1	30-49

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel II.6 dapat ditelaah bahwa dalam skala pengukuran indikator pada kategori Baik dengan bobot 3 mempunyai rentang skala 70-90, kemudian pada

kategori Cukup Baik dengan bobot 2 mempunyai rentang skala 50-69, dan pada kategori Kurang Baik dengan bobot 1 mempunyai rentang skala 30-49. Dalam variabel pelaksanaan memiliki 8 indikator yang masing-masing memiliki 3 item penilaian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Kemudian untuk memberikan arti dalam makna pemecahan masalah penulis menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi peneliti mengambil penelitian di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jalan Mustafa Sari No.01 Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti dalam penentuan lokasi yaitu berdasarkan fenomena kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 90). Adapun

yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, Anggota Satuan Tugas BPBD dan Masyarakat.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 81). Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Badan	1	1	100%
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	1	33%
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	3	1	33%
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	3	1	33%
5	Anggota Satuan Tugas BPBD	47	30	63%
6	Masyarakat Kota Pekanbaru	10	10	100%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>44</b>	<b>88%</b>

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk teknik penarikan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penarikan sampel yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilakukan *Teknik Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan melihat jumlah keanggotaan dari masing-masing

bidang tidak terlalu banyak. Menurut Sugiyono (2016:85) sampling sensus/ jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel jumlah populasinya relative kecil kurang dari 30 orang.

2. Untuk Anggota Satuan Tugas BPBD dan Masyarakat, menggunakan teknik penarikan *Purposive Sampling*. Yaitu teknik penentuan sampel yang hendak diambil, kemudian pemulihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Asalkan tidak menyinggung dari sampel yang ditetapkan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. *Data Primer* yaitu, data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pertanyaan) dokumen dan observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, Anggota Satuan Tugas BPBD, dan Masyarakat Kota Pekanbaru.
2. *Data Sekunder* yaitu, data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu berupa buku hasil penelitian, dokumentasi resmi dari

pemerintah. Yang diperoleh dari Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menurut Sudaryono (2017:207-219), yaitu :

##### **1. Kuesioner**

Kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian ini kuesioner yang telah dibuat disebarakan pada responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat Kota Pekanbaru.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya secara verbal dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta aktual. Peneliti melakukan wawancara kepada responden Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

##### **3. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter dan data yang relevan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data yang akan dikumpulkan dari hasil penelitian wawancara dan penyebaran kuesioner yang nantinya diklarifikasi menurut jenisnya kemudian diolah ke dalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Waktu dan jadwal penelitian ini berlangsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang dimana saat itu dikepalai oleh seorang kepala suku dari suku Batin. Wilayah ini terus berkembang menjadi suatu pemukiman baru dan seiring berjalan waktu terjadilah perubahan pada wilayah tersebut menjadi sebuah dusun yaitu Dsusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689 tepatnya telah terjadi sebuah perjanjian antara Kerajaan Johhor (Malaysia) dengan Hindia Belanda (VOC) dimana isi didalam perjanjian tersebut antara Hindia Belanda Kerajaan Johor, Hindia Belanda diberikan wewenang yang lebih luas. Salah satunya yaitu pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan yang ada didaerah Senapelan/Dusun Payung Sekaki. Dengan itu Belanda juga mendirikan Sebuah Loji di Petapahan yang saat itu merupakan suatu kawasan yang maju dan cukup penting bagi wilayah tersebut.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang suatu peranan penting dalam lalu lintas perdagangan wilayah tersebut. Dan secara letak juga Senapelan memiliki lokasi yang sangat strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan itu juga membantu dalam membantu dan membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman

Minangkabau dan Kampar. Kondisi ini menyebabkan semakin berkembangnya sarana jalan darat yang dimulai dari rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Kerajaan Siak Sri Indra Pura merupakan andil dalam perkembangan wilayah Senapelan. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menjabat dan menetap di Senapelan, beliau membangun suatu Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer. Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sutan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- Tanggal 18 Maret Tahun 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari Tahun 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

## **2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau**

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi hanya bersifat

sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantatra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana didaerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari

Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi. Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Leykol Kaharuddin Nasution yang dilantik dikedudukan sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Kota Pekanbaru memiliki Selogan yaitu “**KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH**”, mempunyai motto: **BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS**. Dimana selogan ini untuk merangkul masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru untuk menjaga kedamaian dan kerukunan yang ada di Kota Pekanbaru sendiri.

### 3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Secara posisi Geografis Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru memiliki luas  $632,32 \text{ Km}^2$ . Pekanbaru memiliki peningkatan dari segi pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang menyebabkan pula meningkatnya juga tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang ada diperkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan

dan aspek lainnya, maka dibentuklah Kecamatan Baru di Kota Pekanbaru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Adapun 12 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.1 : Jumlah dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut dari 12 Kecamatan.**

No.	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Pekanbaru Kota	2,26 KM <sup>2</sup>	0,36%
2	Sail	3,26 KM <sup>2</sup>	0,52%
3	Sukajadi	3,76 KM <sup>2</sup>	0,59%
4	Lima Puluh	4,04 KM <sup>2</sup>	0,64%
5	Senapelan	6,65 KM <sup>2</sup>	1,05%
6	Bukit Raya	22,05 KM <sup>2</sup>	3,49%
7	Marpoyan Damai	29,74 KM <sup>2</sup>	4,70%
8	Payung Sekaki	43,24 KM <sup>2</sup>	6,84%
9	Tampian	59,81 KM <sup>2</sup>	9,46%
10	Rumbai	128,85 KM <sup>2</sup>	20,36%
11	Rumbai Pesisir	157,33 KM <sup>2</sup>	24,88%
12	Tenayan Raya	171,27 KM <sup>2</sup>	27,09%
<b>Jumlah</b>		<b>632,26 KM<sup>2</sup></b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Statistika Kota Pekanbaru 2021.*

Kota Pekanbaru memiliki posisi yang paling strategis pada jalur lintas Timur Sumatera. Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang diantaranya adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Iklm Kota Pekanbaru merupakan daerah yang beriklim tropis dengan keadaan suhu udara pada wilayah ini maksimum berkisar 34,1°C-35,6°C dan suhu

minimum antara 20,2°C-23,0°C. Dan memiliki kadar curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%

#### 4. Keadaan Demografi Kota Pekanbaru

Dengan bertambahnya peningkatan dalam segi sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru menyebabkan meningkatnya pula jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru. Maka dari itu perkembangan penduduk pada masa saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana pertumbuhan penduduk banyak datang yang merantau ke Pekanbaru sendiri yang datang pun dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Pulau Jawa dan bahkan dari Kabupaten yang ada di Provinsi Riau tersebut. Kota Pekanbaru menempati urutan ke 20 dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini dikarenakan Pekanbaru Kota sendiri memiliki potensi dalam pengembangan sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan untuk pendatang sehingga penduduk pendatang banyak yang datang ke Pekanbaru. Dari data yang di kemas oleh Badan Statistika (BPS) Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 Penduduk Kota Pekanbaru yang berada di 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu 1.011.467 jiwa, yang terdiri dari 519.515 jiwa penduduk laki-laki dan 491.952 jiwa penduduk perempuan. Berikut pembagian jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin :

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Luas (KM <sup>2</sup> )	Jumlah
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	2,26	27.059
2.	Sail	11.464	11.492	3,26	22.956
3.	Sukajadi	24.347	24.989	3,76	49.336
4.	Lima Puluh	21.819	22.163	4,04	43.982
5.	Senapelan	18.819	19.364	6,65	38.183
6.	Bukit Raya	54.993	51.533	22,05	106.161
7.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	29,74	141.569
8.	Payung Sekaki	51.993	47.177	43,24	99.170
9.	Tampan	100.656	93.675	59,81	194.331
10.	Rumbai	33.722	36.011	128,85	69.733
11.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	157,33	72.970
12.	Tenayan Raya	74.067	68.452	171,27	142.519
<b>Jumlah</b>		519,515	491,951	632,26	

*Sumber : Badan Statistika Kota Pekanbaru 2021.*

Sebagian besar penduduk yang menduduki atau mendiami Kota Pekanbaru merupakan Suku Melayu, namun ada juga suku lain yang bermigrasi ke Wilayah Kota Pekanbaru yaitu Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Ocu dan sebagainya. Bermigrasi suku ini membuat Kota Pekanbaru menjadi kota yang rukun dan damai. Penduduk kota Pekanbaru memiliki mata pencaharian yaitu berkebun sawit, wiraswasta, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya.

## **B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

### **Kota Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota**

##### **Pekanbaru**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pembantu lainnya. Letak lokasi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru yaitu di Jl. Mustafa Sari No.1 Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kerangka penanggulangan bencana di daerah mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPDB), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi RPBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mengamanatkan Pemerinah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 tahun 2017, memebentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman danketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru.

## 2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah ***“Mengurangi Resiko Bencana dan Penanganan Darurat Bencana”***.

Dengan upaya pencapaian tujuan :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana..

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya pengurangan resiko bencana.
2. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan profesional.
3. Terlaksananya fasilitas dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana.

### C. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

#### Kota Pekanbaru

**Gambar IV. 1 : Bagan Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru**



*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, 2021.*

Di atas merupakan gambar bagan dari Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian dari gambar bagan di atas masing-masing memiliki fungsi dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang terdapat di BPBD Kota Pekanbaru, jabatan fungsional dari bagan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 3 : Daftar Nama Pegawai beserta Jabatannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.**

No	NAMA	JABATAN
1	Zarman Candra, S. STP, M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
2	Maisel Fidayesi, S. Farm, Apt. MM	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
3	Bambang Rifai, A.Md, SE	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
4	Eli Farsya, SH, MH	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
5	Alan Kurnia, S.STP	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
6	Metri Yanti, S.IP	Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
7	Edi Ifrizal, ST	Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Hafizhuddin, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
9	Yettendra, ST	Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
10	Novita Sari, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
11	Octovianus Nahuway, SH	Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
12	Ria Fitria, ST	Kepala Seksi Rehabilitas Badan

		Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
13	Yunaldi Santiago, SH., MM	Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
14	Ali Umar, S.ST, MM	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan pada Seksi Rekonstruksi BPBD Kota Pekanbaru
15	Amrullah Putra, S.STP	Penyusun Renana Kerjasama Kelembagaan pada Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Pekanbaru
16	Zulkarnain, SE, MM	Penyusun Laporan Kebijakan pada Seksi Kedaruratan bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pekanbaru
17	Aidil Salam, ST	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan pada Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Pekanbaru
18	Attur Mudzi Domo, ST	Analisis Mitigasi Bencana pada Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru
19	Henny Rosalina, SE, M.Si	Penyuluh Bencana pada Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru
20	Rino Edrianto, S.Sos	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Metode BPBD Kota Pekanbaru
21	Fakhri Amran, SE	Penyusun Laporan Kebijakan pada Seksi Pencegahan BPBD Kota Pekanbaru
22	Heri Indra Putra, SE, M.Si	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris BPBD Kota Pekanbaru
23	Ibnu Jalmas	Pengelola Logistik pada Seksi Logistik BPBD Kota Pekanbaru
24	Muhammad Randy Fajar, S.IP	Analisis Pengurangan Resiko Bencana pada Seksi Pencegahan BPBD Kota Pekanbaru
25	Agus Setio Edy, SH	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan pada Seksi Logistik BPBD Kota Pekanbaru
26	Maisum Aswarisal, SE	Pengadministrasian Umum BPBD Kota Pekanbaru
27	Sukendar	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPBD Kota Pekanbaru
28	Hanafi	Pengadministrasian Umum pada Seksi Kedaruratan BPBD Kota Pekanbaru
29	Hendriko	Pengadministrasian Umum pada Seksi Pencegahan BPBD Kota Pekanbaru
30	Riana Putri	Pengadministrasian Keuangan BPBD Kota Pekanbaru

31	Zulfiqri	Pengadministrasian Kepegawaian BPBD Kota Pekanbaru
32	Rusmin	Pengadministrasian Umum pada Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru
33	Edi Suryadi	Pengadministrasian Umum pada Seksi Logistik BPBD Kota Pekanbaru

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, 2021.*

#### **D. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

##### **1. Kepala Pelaksana**

- 1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi serta membantu dan menjalankan tugas sehari-hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.
- 2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - Pengkoordinasian dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana
  - Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penanggulangan bencana

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana

## 2. Sekretariat

- 1) Sekretaris Unsur Pelaksana Badan Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Unsur Pelaksana Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Sekretaris Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - Perumus dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran BPBD\
  - Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
  - Pengkoordinasian, pelaksanaan pelayanan, pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan serta pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
  - Pengkoordinasian dan pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor

### 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dan melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana serta pelaksanaannya
  - Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat serta pengurangan resiko bencana
  - Pelaksanaan fasilitas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pihak yang membutuhkan, dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjut teknis, simulasi dan gladi

- Penyusunan daftar pertanyaan, monitoring lapangan, pengevaluasian dan penyusunan laporan evaluasi data pencegahan pra bencana
- Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan serta analisis data potensi bahaya atau ancaman bencana, dan pelaksanaan peninjauan lapangan untuk mengetahui situasi yang ada pada saat terjadi bencana

#### 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan kedaruratan dan logistik
- 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - Perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
  - Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
  - Perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
  - Pelaksanaan fasilitas pada pihak yang membutuhkan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat

- Pelaksanaan pengumpulan data, observasi lapangan, mengkaji dan menyajikan data tentang kronologis bencana, jumlah korban dan jumlah prasarana yang rusak
- Pengumpulan dan pengelolaan serta analisis darurat tanggap bencana
- Pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengungsi
- Penyusunan konsep rencana pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi saat tanggap darurat
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban-korban bencana
- Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan pedoman dalam melaksanakan tugas
  - Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana
  - Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- 3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis memberikan pembahasan tentang hasil dan juga hambatan dari penelitian. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru, agar dapat memastikan data yang pasti dan akurat maka dari itu terlebih dahulu penulis harus menentukan identitas responden yang tercantum didalam kuesioner yang telah peneliti sebarakan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur yang mendasar ataupun unsur genetika dari responden. Pada identitas responden jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan jenis kelamin sangat memengaruhi cara kerja dan emosional yang ada di diri seseorang. Kemudian dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan jenis kelamin dimaksud untuk mengetahui sikap yang di ambil dalam menjawab kuesioner yang telah penulis sebarakan. Agar lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini jenis kelamin berdasarkan kelompok responden Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

**Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1	1
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	-	1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-	1
4	Anggota Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPBD)	30		30
5	Masyarakat Kota Pekanbaru	7	3	10
<b>Jumlah</b>		39	4	43
<b>Persentase</b>		<b>91%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Penelitian, 2021*

Dapat dilihat pada tabel V.1 yang disajikan diatas jumlah dari responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 43 orang. Dengan uraian responden yang mengisi kusioner yaitu 30 orang anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dan 10 orang masyarakat Kota Pekanbaru, lalu wawancara pada Kepala Bidang Pencegahan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan responden masing-masing 1 orang. Untuk anggota satuan tugas BPBD terdapat 30 responden berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada responden berjenis kelamin perempuan, dan pada masyarakat kota Pekanbaru terdapat 7 responden berjenis kelamin laki-laki dan 3 responden berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya pada responden Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdapat 1 orang yang berjenis kelamin perempuan, pada responden Bidang Kedaruratan dan

Logistik terdapat 1 orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan pada responden Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga terdapat 1 orang yang berjenis kelamin laki-laki. Sehingga secara keseluruhan terdapat 39 responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 91% dan 4 responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 9%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan daripada responden yang berjenis kelamin perempuan.

## **2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

Dalam proses penelitian tingkatan umur adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kemampuan ataupun pola berfikir seseorang dan juga produktivitas kerja. Tingkat usia seseorang merupakan suatu bentuk dari kematangan dari seseorang dalam melakukan dan mengambil suatu keputusan yang tepat dalam setiap menjalankan aktivitas mereka. Dalam penelitian ini peneliti memilih identitas responden berdasarkan tingkatan umur karena juga dapat memengaruhi responden dalam pengisian kusioner. Dari kusioner yang dibagikan, tingkatan umur responden berdasarkan kelompok responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat kota Pekanbaru dan wawancara pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Tingkatan Umur	Kelompok responden						Jumlah	Persentase
		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota Satuan Tugas BPBD	Masyarakat Kota Pekanbaru			
1	21-30 Thn	-	-	-	20	2	22	51%	
2	31-40 Thn	-	-	1	6	4	11	21%	
3	41-50 Thn	1	1	-	4	4	10	23%	
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Olahan Penelitian, 2021*

Dari tabel V.2 dapat diketahui bahwa terdapat 3 rentang tingkat umur yaitu pada usia 21-30 tahun, 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Kemudian dalam tabel tersebut menyatakan ada 20 orang responden dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan terdapat 2 responden masyarakat kota Pekanbaru yang masing-masing berada pada tingkat umur 21-30 tahun, sehingga jumlah dari keseluruhan responden pada tingkatan umur tersebut yaitu 22 responden dengan persentase 51% dari jumlah keseluruhan responden. Selanjutnya pada rentang usia 31-40 tahun terdapat 1 responden kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 6 responden dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 4 responden masyarakat kota Pekanbaru, sehingga keseluruhan pada rentang usia tersebut yaitu 11 responden dengan persentase 26% dari jumlah keseluruhan responden. Kemudian pada rentang usia 41-50 tahun terdapat 1 responden pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 1 responden pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, 4 responden

dari anggota satuan tugas BPBD dan 4 responden masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga jumlah keseluruhan pada rentang usia tersebut adalah 10 responden dengan persentase 23% dari jumlah keseluruhan responden. Dapat ditelaah bahwa penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya tingkatan umur yang paling dominan yaitu pada rentang usia 21-30 tahun. Pada tingkatan tersebut secara keseluruhan mempunyai pengalaman dalam bekerja meskipun usia tersebut bisa dikatakan tergolong usia yang menengah menuju dewasa.

### **3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi jawaban responden. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pula pola pikir dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan masalah ataupun mengambil keputusan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jika tingkat pendidikan responden semakin tinggi maka semakin baik pula jawaban dan penjelasan yang diberikan. Maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden kepada anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V. 3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Kelompok Responden					Jumlah	Persentase
		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota Satuan Tugas BPBD	Masyarakat Kota Pekanbaru		
1	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA/Sederajat	-	-	-	-	8	8	18%
4	D3	-	-	-	2	-	2	5%
5	S1	-	-	1	28	2	31	72%
6	S2	1	1	-	-	-	2	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel V. 3 diatas bisa kita lihat identitas responden dari segi tingkat pendidikan dapat dilihat ada 6 macam tingkat pendidikan dari tingkatan yang terendah yaitu SD/ sederajat hingga tingkatan yang lebih tinggi yaitu Strata dua (S2). Kemudian terdapat 8 masyarakat kota Pekanbaru dengan persentase 18% yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/ sederajat, 2 dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Pekanbaru dengan persentase 5% yang memiliki pendidikan terakhir Diploma tiga (D3). Kemudian terdapat 1 responden pada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 28 anggota satuan tugas BPBD, dan 2 masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir Strata satu (S1) dengan jumlah keseluruhan masing-masing responden dengan persentase 72%. Selanjutnya terdapat 1 responden pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan 1 responden pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang memiliki tingkat pendidikan terakhir strata dua (S2) dengan persentase 5%. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa berbagai macam tingkat pendidikan responden dari yang terendah hingga yang tertinggi dan rata-

rata responden tingkat pendidikan didominasi oleh S1. Namun jika ditelaah dapat dilihat bahwa dari ke dua kelompok responden sudah memadai untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan juga menjawab kusioner yang peneliti sebarakan.

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kebakaran lahan yang terjadi pada umumnya di sebabkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor manusia yang menjadi pemicu kebakaran lahan diantaranya konversi lahan, kegiatan penyiapan lahan, dan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Untuk melihat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, maka dari itu penulis uraikan beberapa indikator penelitian yang sesuai dengan rencana penelitian yaitu sebagai berikut :

### **1. Perencanaan (*planning*)**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan di dalam organisasi, tentunya harus ada perencanaan (*planning*) terlebih dahulu. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting. Alasannya adalah karena perencanaan dinilai sebagai langkah awal yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Apabila tidak ada perencanaan, semua kegiatan di organisasi tidak

akan berarti. Perencanaan menjadi aspek paling penting karena segala ide atau konsep untuk mencapai tujuan tertuang di dalam perencanaan.

Untuk mencapai tujuan, diperlukan tindakan yang dirumuskan melalui perencanaan. Apapun organisasi yang dijalankan harus memiliki perencanaan yang matang dan jelas agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi yang menganut sistem apapun pasti akan mengawasi setiap kegiatannya dengan fungsi perencanaan.

Perencanaan (planning) yang dimaksud didalam penelitian ini adalah bagaimana tiap bidang yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat membuat atau menyusun sebuah perencanaan (planning), mulai dari penyusunan strategi atau alternatif yang di gunakan pada saat terjadinya kebakaran, cara/metode untuk mendapatkan titik lokasi kejadian. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dengan responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada indikator perencanaan (planning), maka mengenai tanggapan responden terhadap strategi Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Perencanaan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengumpulan Data	13	17	-	30
2	Penentuan Status	14	16	-	30
3	Penentuan Solusi dengan berbagai alternatif	18	12	-	30
	<b>Jumlah</b>	45	45	-	90
	<b>Rata-Rata</b>	15	15	-	30
	<b>Skor</b>	135	135	-	270
	<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.4 menunjukkan bahwa pada item penilaian 1 responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjawab pada kategori baik berjumlah 13 orang dan pada kategori cukup baik berjumlah 17 orang dan untuk jawaban kategori kurang baik tidak ada. Maka dari jawaban responden tersebut didapat bahwa dalam pengumpulan data mengenai kebakaran lahan yang terjadi dilakukan dengan baik dan akurat sehingga masuk dalam kategori baik.

Kemudian untuk item penilaian 2 mengenai penentuan status kebakaran lahan dapat dilihat bahwa 14 responden menjawab baik lalu diikuti 16 responden menjawab cukup baik dan tidak ada responden yang menjawab kurang baik. Sehingga pada jawaban responden tersebut dalam item ini sudah dilakukan dengan baik.

Selanjutnya untuk item penilaian 3 mengenai penentuan solusi dengan berbagai alternatif mengenai kebakaran lahan dapat dilihat responden yang

menjawab kategori baik berjumlah 18 orang, kemudian 12 orang responden yang menjawab cukup baik dan tidak ada jawaban untuk kategori kurang baik. Sehingga dari semua jawaban responden tersebut dalam item ini sudah dilakukan dengan baik.

Dari beberapa item pertanyaan yang dinilai responden didapat keseluruhan skor 270 dengan kategori Baik, artinya rata-rata responden dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjawab bahwa perencanaan (planning) terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dibawah ini terdapat jawaban responden mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari responden masyarakat yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Perencanaan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengumpulan Data	2	8	-	10
2	Penentuan Status	4	6	-	10
3	Penentuan Solusi dengan berbagai alternatif	7	3	-	10
<b>Jumlah</b>		13	17	-	30
<b>Rata-Rata</b>		4	6	-	10
<b>Skor</b>		39	51	-	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Pada tabel V.5 terdapat item penilaian 1 pengumpulan data mengenai kebakaran lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada responden

masyarakat Kota Pekanbaru, pada tabel tersebut menyatakan kategori baik berjumlah 2 responden dengan beranggapan bahwa pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan baik, selanjutnya yang menyatakan cukup baik berjumlah 8 responden, dan yang menyatakan kurang baik tidak ada jawaban. Sehingga dari jawaban responden tersebut untuk item penilaian ini sudah berjalan dengan baik.

Pada item penilaian 2 penentuan status mengenai kebakaran lahan pada tabel diatas menunjukkan pada kategori baik terdapat 4 responden, lalu 6 responden pada kategori cukup baik dan tidak ada jawaban untuk kategori kurang baik. Selanjutnya untuk item penilaian ke 3 penentuan solusi dengan berbagai alternatif pada kategori baik terdapat 7 responden, kategori cukup baik berjumlah 3 responden dan jawaban pada kategori kurang baik tidak ada. Untuk indikator perencanaan (planning) didapat keseluruhan skor 90 dengan kategori Baik, yakni dengan rata-rata responden tersebut menyatakan bawa untuk perencanaan sudah berjalan dengan baik.

Adapun hasil wawancara pada Senin, 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator perencanaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sendiri metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara merekap langsung kejadian kebakaran lahan yang terjadi seperti merekap luas lahan yang kebakar, laporan yang didapat dari satuan tugas tersebut yang nantinya direkap oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk penentuan status sendiri itu dari walikota seperti darurat atau tidak daruratnya dan*

*pihak BPBD yang turun tangan untuk mengatasi masalah kebakaran tersebut. Sedangkan untuk alternatif lainnya kami memberikan sosialisasi ke kecamatan, kelurahan dengan menyebarkan brosur, pamflet dan lain sebagainya. Setiap datang musim kemarau kami membuat himbauan dan menyebarkan surat-surat ke kelurahan supaya tiap kelurahan menyampaikan kepada masyarakat. Dari situlah terbentuk kelurahan tangguh bencana. Kalau dilihat dari keseluruhannya semua perencanaan yang dilakukan oleh Bidang Kesiapsiagaan ini sudah berjalan dengan baik mulai dari pengumpulan data, penentuan statusnya dan solusi lainnya.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada Senin, 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator perencanaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Kalau di Bidang Kedaruratan dan Logistik ini sendiri kami mengumpulkan data atau mendapatkan informasi mengenai titik api dari masyarakat yang melapor pada saat terjadinya kebakaran lahan melalui call center milik BPBD, begitu juga dengan penentuan status kebakaran melalui walikota. Kami selaku yang menangani 24 jam harus siap khususnya di Bidang Kedaruratan dan Logistik ini. Sementara strategi atau mitigasi dari bidang kami ini tentunya penanganannya harus tepat waktu, biasanya untuk sampai ke lokasi kejadian memakan waktu 45 menit tergantung jarak lokasi kejadian juga. Kecuali lokasi kejadian yang terletak jauh di pedalaman membuat anggota kesulitan untuk sampai ke lokasi kejadian, itu biasanya memakan waktu yang cukup lama karna tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Jika terjadi kendala seperti itu kami berjalan kaki untuk sampai ke lokasi kejadian dan melakukan penyambungan peralatan pemadam kebakaran. Selain itu apabila ada kendala lainnya yang kami tidak bisa lakukan sendiri, kami meminta bantuan BPBD Provinsi, Damkar, TNI/Polri. Karena bencana kebakaran seperti ini harus dilakukan secara bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada Senin, 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator perencanaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Untuk bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini yang kami lakukan yaitu pada saat pasca kebakaran atau sesudah kebakaran. Ketika sudah selesai terjadi bencana, kami menghitung berapa total kerugian materialnya setelah itu kami rekap menjadi data. Alternatif lain yang kami lakukan yaitu bagaimana merumuskan supaya tidak terjadi lagi, ada kebakaran berarti ada kerugian yang dihasilkan. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi inilah yang menangani pasca kebakaran dengan melakukan reboisasi. Apabila yang terbakar lahan sawit, kami akan menanam kembali sawit, menyesuaikan apa yang ditanam pertama kali. Ketika bencana datang bidang kedaruratan dan logistik lah yang menangani, kalau bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mereka melakukan penyuluhan mengantisipasi terjadinya bencana, dan terakhir kami lah yang mengatasi sesudah bencana itu terjadi.”*

Dari kutipan ketiga wawancara yang telah dijelaskan oleh masing-masing kepala bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap indikator perencanaan (planning) dapat kita telaah bahwa hal itu telah dilakukan tiap masing-masing bidang sesuai tupoksi mereka. Pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mereka melakukan penyuluhan melalui brosur, pamflet serta baliho untuk mencegah terjadinya kebakaran, sementara pada bidang kedaruratan dan logistik mereka yang langsung menangani atau mengatasi masalah kebakaran lahan tersebut, dan setelah kebakaran sudah teratasi barulah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menangani pasca kejadian dengan cara melakukan reboisasi atau melakukan konstruksi bangunan jika ada material yang terbakar. Dari hasil wawancara yang didapat tersebut bisa dilihat bahwa di dalam perencanaan dalam mengatasi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik, sehingga masuk dalam kategori Baik.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan unsur dari indikator strategi yang sangat penting, tanpa adanya pengorganisasian suatu organisasi tidak dapat berjalan. Pengorganisasian ialah kegiatan mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian juga sama pentingnya di dalam sebuah organisasi. Pengorganisasian memuat koordinasi baik dalam bagian maupun antar bagian organisasi. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan berkesinambungan satu sama lain.

Pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang oleh pimpinan kepada staff dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Keberhasilan atau kegagalan organisasi berhubungan dengan para anggotanya. Suatu keberhasilan dapat dicapai apabila ada kerjasama yang baik antar para anggotanya. Sebaliknya kegagalan bisa terjadi karena adanya faktor internal di pengorganisasian tersebut yang bersifat negatif.

Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu pengorganisasian dalam pengaturan pembagian kerja pegawai, pembagian tugas dan fungsi tiap bidang, serta pengelompokkan fasilitas. Kemudian adapun tanggapan responden dari item penilaian indikator pengorganisasian tentang strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengorganisasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengaturan pembagian kerja	18	12	-	30
2	Pembagian tugas dan fungsi	30	-	-	30
3	Pengelompokkan fasilitas	26	4	-	30
<b>Jumlah</b>		74	16	-	90
<b>Rata-Rata</b>		25	5	-	30
<b>Skor</b>		222	48	-	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.6 dapat dilihat jawaban responden pada indikator pengorganisasian yakni dari item penilaian 1 pengaturan pembagian kerja menyatakan bahwa 18 responden menjawab baik, dan 12 responden menjawab cukup baik. Artinya pada item penilaian ini sudah berjalan dengan baik, dengan memberikan pembagian kerja pegawai maka akan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan strategi untuk menanggulangi masalah kebakaran lahan.

Selanjutnya pada item penilaian 2 terkait pembagian tugas dan fungsi didapat jawaban 30 responden untuk kategori baik, tidak ada jawaban pada kategori cukup baik dan kurang baik. Dapat dilihat dari jawaban responden pada item penilaian ini pembagian tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai sudah sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kemudian pada item penilaian 3 terkait pengelompokkan fasilitas didapat 26 responden menjawab untuk kategori baik dan 4 responden menjawab di

kategori cukup baik. Artinya pada item penilaian ini pengelompokan fasilitas sudah dilakukan dengan baik.

Dari beberapa item pertanyaan yang dinilai responden didapat keseluruhan skor 270 dengan kategori Baik, artinya rata-rata responden dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjawab bahwa pengorganisasian terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dibawah ini terdapat jawaban responden mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari responden masyarakat yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.7 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengorganisasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengaturan pembagian kerja	9	1	-	10
2	Pembagian tugas dan fungsi	10	-	-	10
3	Pengelompokan fasilitas	9	1	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Skor</b>		<b>84</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>90</b>
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.7 dapat dilihat jawaban responden terkait pengorganisasian pada item penilaian 1 tentang pengaturan pembagian kerja pada kategori baik sebanyak 9 orang yang menjawab dan 1 responden menjawab pada kategori cukup baik. Dengan beranggapan bahwa pada saat terjadinya kebakaran lahan

anggota satuan tugas BPBD mampu mengatur pembagian kerja dengan baik untuk mengatasi kejadian tersebut.

Kemudian pada item penilaian 2 terkait pembagian tugas dana fungsi yang menjawab pada kategori baik berjumlah 10 responden, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik dan kurang baik. Artinya dalam melakukan pekerjaannya anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai telah ditetapkan.

Selanjutnya pada item penilaian 3 terkait pengelompokan fasilitas yang menjawab pada kategori baik berjumlah 9 responden dan 1 responden menjawab pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang mereka gunakan sudah mencukupi untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi.

Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden masyarakat dominan menjawab baik. Didapat keseluruhan skor 90 dengan kategori Baik, yakni dengan rata-rata responden tersebut menyatakan bawa untuk pengorganisasian sudah dilakukan dengan baik.

Adapun hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator pengorganisasian strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Pada saat pembagian tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini sendiri sewaktu ada kejadian kebakaran di bagi menjadi per regu yang berisi 10 orang, misalnya regu yang sedang piket ada masyarakat yang menelepon melaporkan kejadian melalui call center, kemudian satgas yang turun ke lapangan. Sebelum satgas sampai ke lokasi kejadian, mereka bekerjasama dengan masyarakat yang berada di lokasi kejadian untuk*

*membantu pemadaman terlebih dahulu. Apabila titik api bisa dipadamkan oleh masyarakat, satgas tidak perlu lagi membawa fasilitas untuk pemadaman dan hanya meninjau ke lokasi kebakaran tersebut. Apabila sebaliknya, api yang tidak bisa dipadamkan oleh masyarakat barulah anggota satgas turun tangan dan membawa fasilitas lengkap dengan mobil BPK. Anggota satuan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai pembagiannya masing-masing melalui arahan dan pengawasan dari atasan. Tugas kami adalah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarang membakar lahan dengan melalui sosialisasi langsung, spanduk, baliho bahkan penyebaran brosur. Sarana dan prasarana yang digunakan tentunya sudah memadai, terkecuali apabila kebakaran besar yang terjadi barulah kami meminta bantuan bekerjasama dengan BPBD Provinsi, TN/Polri, Pemadam Kebakaran, dan instansi-instansi lain yang berkaitan. Secara keseluruhan mengenai pembagian tugas sudah dilakukan dengan baik.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada Senin, 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator pengorganisasian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Pembagian tugas di bidang kedaruratan dan logistik ini sudah dilakukan dengan baik. Sesuai bidangnya masing-masing. Di atasi oleh bidang kedaruratan dan logistik di perintahkan ke kepala seksi kedaruratan. Di bidang kedaruratan ini yang akan melaksanakan eksekusi dilapangan untuk memadamkan lahan. Setelah pasca kebakaran, diturunkan ke kbid rehabilitasi dan rekonstruksi. Kbid rehabilitasi lah yang menangani pasca kebakaram dengan melakukan reboisasi. Beda lagi dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, mereka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengelola lahan atau perkebunan dengan cara membakar melalui penyebaran brosur bahkan sosialisasi langsung.. Lahan yan terbakar ini mayoritas milik masyarakat, karena Pekanbaru termasuk zero fire artinya 0 api dan lahan pun tidak luas, rata-rata milik masyarakat sedikit sekali milik pemko. Dari sini bisa dilihat tiap bidang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Untuk sarana dan prasarana kami memaksimalkan peralatan yang ada di satuan tugas dan dibantu oleh instansi lain. Secara keseluruhan didalam pengorganisasian ini kami sudah melakukannya dengan baik dan semaksimal mungkin.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada Senin, 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator pengorganisasian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Pembagian tugas pada masing-masing bidang tentunya sudah dilakukan dengan baik. Pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ini sendiri tiap anggota sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi kami. Kami nantinya yang merekap hasil data pasca kejadian, total kerugian materialnya. Nanti kami juga membantu bagian kontruksi jika yang terbakar bangunan dan membantu menanam kembali jika yang terbakar lahan perkebunan. Sarana prasarana yang ada juga kami pergunakan sebaik mungkin.”*

Dari kutipan ketiga wawancara yang telah dijelaskan oleh masing-masing kepala bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap indikator pengorganisasian (organizing) dapat kita telaah bahwa pada indikator pengorganisasian, mulai dari pengaturan pembagian tugas pegawai, pembagian tugas dan fungsi serta pengelompokkan fasilitas itu semua sudah dilakukan dengan baik oleh tiap masing-masing bidang sesuai tupoksi mereka. Pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mereka mengatur pembagian tugas dan fungsi untuk melakukan penyuluhan secara langsung, melalui brosur, pamflet serta baliho untuk mencegah terjadinya kebakaran, sementara pada bidang kedaruratan dan logistik mereka yang akan melaksanakan eksekusi dilapangan untuk memadamkan lahan dan langsung menangani atau mengatasi masalah kebakaran lahan tersebut dengan pembagian tugas dan melakukan pengelompokkan fasilitas

yang akan digunakan dengan baik, dan setelah kebakaran sudah teratasi barulah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang menangani pasca kejadian. Dari hasil wawancara yang didapat tersebut bisa dilihat bahwa di dalam pengorganisasian dalam mengatasi masalah kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukannya dengan baik. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa indikator pengorganisasian ini berada pada kategori Baik.

### 3. Kepemimpinan (*directing*)

Kepemimpinan di dalam organisasi yaitu sebuah proses dimana seorang pemimpin mempengaruhi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan menjadi faktor terpenting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya seseorang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi maka organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sangat diperlukan figur seorang pemimpin yang dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini seperti pembinaan pegawai, pengarahan pegawai serta pelatihan pegawai yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena 3 item penilaian tersebut sangat mempengaruhi dalam mengatasi masalah kebakaran lahan.

Kemudian jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator kepemimpinan terkait strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Kepemimpinan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan Pegawai	16	14	-	30
2	Pengarahan Pegawai	21	9	-	30
3	Pelatihan Pegawai	30	-	-	30
	<b>Jumlah</b>	67	23	-	90
	<b>Rata-Rata</b>	22	8	-	30
	<b>Skor</b>	201	69	-	270
	<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>			

Sumber : *Modifikasi Penulis, 2021.*

Dalam tabel V.8 pada item penilaian 1 terkait pembinaan pegawai dapat dilihat bahwa 16 responden menjawab pada kategori baik dan 14 responden menjawab pada kategori cukup baik. Kemudian pada item penilaian 2 terkait pengarahan pegawai yang menjawab pada kategori baik berjumlah 21 responden dan 9 responden menjawab pada kategori cukup baik. Selanjutnya untuk item penilaian 3 terkait pelatihan pegawai secara keseluruhan 30 responden menjawab pada kategori baik, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik dan kurang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada ketiga item penilaian tersebut mulai dari pembinaan pegawai, pengarahan pegawai dan pelatihan pegawai semuanya sudah dilakukan dengan baik yang diberikan oleh atasan ke pegawai sesuai bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dari beberapa item pertanyaan yang dinilai responden anggota satuan tugas BPBD didapat jumlah keseluruhan skor 270 yang berada pada

kategori Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kategori kepemimpinan sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya dari penyebaran kuesioner terdapat jawaban responden dari masyarakat Kota Pekanbaru terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kepemimpinan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan Pegawai	6	4	-	10
2	Pelatihan Pegawai	4	6	-	10
3	Pengarahan Pegawai	-	3	7	10
<b>Jumlah</b>		10	13	7	30
<b>Rata-Rata</b>		3	5	2	10
<b>Skor</b>		30	39	21	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Tabel V.9 menjelaskan, pada item penilaian 1 mengenai pembinaan pegawai pada kategori baik berjumlah 6 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 4 responden dan pada kategori kurang baik tidak ada responden yang menjawab. Kemudian pada item penilaian 2 terkait pengarahan pegawai pada kategori baik berjumlah 4 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 6 responden dan jawaban responden pada kategori kurang baik tidak ada. Selanjutnya pada item penilaian 3 terkait pelatihan pada kategori baik tidak ada responden yang menjawab, pada kategori cukup baik berjumlah 3 responden dan pada kategori

kurang baik berjumlah 7 responden. Untuk responden yang menjawab kurang baik pada item penilaian ke 3 ini, dikarenakan 7 responden yang belum pernah menjadi tim relawan pada saat terjadinya kebakaran lahan. Walaupun demikian dilihat dari keseluruhan item penilaian pada indikator kepemimpinan ini tetap masuk pada kategori Baik.

Dari beberapa item penilaian yang dinilai masyarakat Kota Pekanbaru didapat jumlah keseluruhan skor yaitu 90 yang berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat bahwa BPBD sudah melakukan tugasnya dengan baik dan turun ke lapangan langsung untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat supaya bisa bekerjasama dan untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengenai indikator kepemimpinan dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Pembinaan pegawai yang kami lakukan tentunya baik ya, BPBD ini kan sifatnya disiplin jadi harus tepat waktu. Kalau ada pegawai yang melakukan kesalahan seperti tidak disiplin tadi kami akan memanggil dengan cara tatap muka, di beri peringatan surat bahkan diberi sanksi. Tapi sejauh ini belum ada yang seperti itu. Semua pegawai dibina dengan baik supaya maksimal saat bekerja dilapangan. Mereka juga diberi pelatihan khusus ya, seperti misalnya membentuk kelurahan tangguh bencana bekerjasama dengan masyarakat, relawan diberikan pelatihan dan pengarahan begitu juga dengan masyarakat di beri penyuluhan, di beri juga pelatihan dasar. Karena ketika sewaktu-waktu bencana itu datang mereka bisa membantu memadamkan api terlebih dahulu menjelang tim BPBD sampai ke lokasi kejadian, jadi kerjasama antara masyarakat dengan instansi sangat diperlukan. Secara keseluruhan atasan sudah memberikan*

*pembinaan, pelatihan dan penyuluhan yang terbaik untuk pegawai dan masyarakat.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator kepemimpinan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Tentunya BPBD sendiri sudah memberikan pembinaan, pengarahan dan pelatihan kepada pegawainya dengan baik. Dengan diberikannya hal tersebut supaya kinerja pegawai pada saat menangani bencana maksimal di lapangan. Karena kita ini melayani pelayanan yang sifatnya bencana, jadi 24 jam itu harus siap siaga. Oleh karena itu BPBD selalu memberikan pelatihan khusus ke pegawai, ntah itu dimulai dengan menggunakan peralatan pemadam dan juga membentuk kelurahan tangguh bencana. Kami juga memberikan penyuluhan ke masyarakat, masyarakat juga diberikan pelatihan supaya bisa membantu anggota satuan tugas pada saat mengatasi kebakaran.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator kepemimpinan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Kami sudah memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan kepada semua pagawai. Masing-masing bidang juga sudah memberikan pelatihan untuk mengatasi kebakaran tadi. Misalnya di bidang ini kami melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara membangun kembali material yang sudah terbakar dengan keadaan seperti semula. Begitu pun dengan kebakaran lahan, kami memberikan pelatihan kepada pegawai supaya nantinya bisa menanam kembali tanaman yang terbakar tersebut. Selain di pegawai BPBD juga memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting ya untuk masyarakat, supaya bisa membantu juga. Jadi untuk pegawai maupun masyarakat sudah kami*

*berikan pembinaan, pengarahan dan pelatihan terbaik untuk sama-sama mengatasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.”*

Dilihat dari petikan ketiga wawancara yang sebelumnya telah dipaparkan diatas, dapat ditelaah bahwa pada responden masing-masing bidang yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari pihak atasan sudah memberikan pembinaan, pengarahan dan pelatihan pegawai dengan baik. Tidak hanya pegawai, masyarakat juga di berikan pelatihan dasar untuk membantu anggota satuan tugas BPBD. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa indikator kepemimpinan ini berada pada kategori baik sesuai hasil yang didapatkan.

#### **4. Pengkoordinasian (*coordinating*)**

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyesuaikan tugas. Koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan sangat berpengaruh dalam mengatasi permasalahan. Koordinasi antar bagian di dalam organisasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, dan berbagai masalah lainnya yang tidak diharapkan. Itulah pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi adalah untuk manajemen dan untuk mengusahakan terjadinya keselasan dan keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya di dalam organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini yang di maksud dari pengkoordinasian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu kerjasama sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi, kerjasama terhadap masyarakat, dan kerjasama terkait instansi lainnya. Karena jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bekerjasama dengan masyarakat dan instansi luar maka akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut.

Kemudian jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator pengkoordinasian terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengkoordinasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama sumber daya manusia di dalam organisasi	17	13	-	30
2	Kerjasama terhadap masyarakat	29	1	-	30
3	Kerjasama dengan instansi luar organisasi	21	9	-	30
<b>Jumlah</b>		67	23	-	90
<b>Rata-Rata</b>		22	8	-	30
<b>Skor</b>		201	69	-	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.10 jawaban responden dari item penilaian 1 terkait kerjasama sumber daya manusia di dalam organisasi 17 responden menjawab pada kategori baik dan 13 responden menjawab pada kategori cukup baik dengan beranggapan bahwa mereka telah melakukan kerjasama satu sama lain di setiap anggota pada masing-masing bidang. Kemudian untuk item penilaian 2 terkait kerjasama terhadap masyarakat, 29 responden menjawab pada kategori baik dan 1 responden menjawab pada kategori cukup baik dengan beranggapan bahwa mereka saling

bekerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi. Selanjutnya dari item penilaian 3 terkait kerjasama dengan instansi luar organisasi, 21 orang menjawab pada kategori baik dan 9 orang menjawab pada kategori cukup baik. Dari beberapa item pertanyaan yang di nilai responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapat jumlah keseluruhan skor 270 yang berada pada kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator pengkoordinasian sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya dari penyebaran kuesioner terdapat jawaban responden dari masyarakat Kota Pekanbaru terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengkoordinasian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama sumber daya manusia di dalam organisasi	3	7	-	10
2	Kerjasama terhadap masyarakat	2	8	-	10
3	Kerjasama dengan instansi luar organisasi	5	5	-	10
<b>Jumlah</b>		10	20	-	30
<b>Rata-Rata</b>		3	7	-	10
<b>Skor</b>		30	60	-	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.11 menjelaskan pada item penilaian 1 mengenai kerjasama sumber daya manusia di dalam organisasi pada kategori baik berjumlah 3

responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 7 responden dan pada kategori kurang baik tidak ada responden yang menjawab. Kemudian pada item penilaian 2 mengenai kerjasama terhadap masyarakat pada kategori baik berjumlah 2 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 8 responden. Selanjutnya di item penilaian 3 mengenai kerjasama dengan instansi luar organisasi pada kategori baik berjumlah 5 responden dan yang menjawab pada kategori cukup baik berjumlah 5 responden. Maka secara keseluruhan didapat skor 90 yang termasuk dalam kategori baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator pengkoordinasian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Kerjasama antara anggota dengan masyarakat dilakukan dengan baik, melibatkan RT/RW supaya mengajak masyarakat untuk peduli api, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Anggota satuan tugas pun bekerja dengan sangat baik disaat pemadaman api. Kami juga bekerjasama dengan instansi dari luar seperti TNI/Polri, manggala agni, damkar, DLHK, dll.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator pengkoordinasian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Kami bekerjasama dengan masyarakat melalui kelurahan tangguh bencana, bekerjasama juga dengan instansi dari luar organisasi seperti*

*TNI/Polri, BPBD Provinsi dan masih banyak lagi. Secara keseluruhan kerjasama kami ini dilakukan dengan baik sesuai SOP ya.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator pengkoordinasian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Pastinya kerjasama yang dilakukan sudah baik ya, instansi luar juga membantu kami dengan baik. Intinya saling bekerjasama untuk memadamkan api, karena api itu jika sudah sangat meluas tidak bisa kami lakukan sendiri, harus ada kerjasama dari pihak luar, begitu kira-kira.”*

Dari hasil wawancara diatas ditarik kesimpulan untuk indikator pengkoordinasian, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukannya dengan baik dan bekerjasama dengan masyarakat serta instansi yang terkait untuk menangani masalah kebakaran lahan ini. Jadi pada indikator pengkoordinasian masuk pada kategori baik.

### **5. Pengendalian (*controlling*)**

Pengendalian adalah proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kinerja. Pengendalian sangat penting dalam organisasi. Karena upaya memaksimalkan efisiensi dan produktivitas organisasi akan tercapai, apabila dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengawasi kinerja pegawai. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini pimpinan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pegawai. Hal demikian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai dengan semestinya.

Kemudian adapun jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator pengendalian terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.12 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengendalian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemantauan (monitoring) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)	14	16	-	30
2	Pengawasan terhadap Sumber daya Manusia (SDM)	30	-	-	30
3	Evaluasi (monitoring) terhadap SDM	30	-	-	30
<b>Jumlah</b>		74	16	-	90
<b>Rata-Rata</b>		25	5	-	30
<b>Skor</b>		222	48	-	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.12 pada item penilaian 1 terkait pemantauan terhadap sumber daya manusia dapat dilihat bahwa 14 responden menjawab pada kategori baik dan 16 responden menjawab pada kategori cukup baik. Kemudian pada item penilaian 2 terkait pengawasan terhadap sumber daya manusia dapat dilihat bahwa seluruh responden berjumlah 30 responden menjawab pada kategori baik. Dan untuk item penilaian 3 terkait evaluasi terhadap sumber daya manusia 30 responden menjawab pada kategori baik, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik dan kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa didalam pengendalian ini sepenuhnya

sudah di awasi oleh atasan dan di pantau langsung oleh atasan pada saat terjadinya kebakaran. Dari item pertanyaan yang di nilai oleh responden tersebut didapat jumlah keseluruhan skor yaitu 270 yang berada pada kategori baik, artinya dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator pengendalian pada responden anggota satuan tugas BPBD sudah terlaksana dengan baik melalui pengawasan langsung dari atasan.

Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner untuk masyarakat kota pekanbaru terkait pengendalian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.13 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengendalian pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemantauan (monitoring) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)	4	6	-	10
2	Pengawasan terhadap Sumber daya Manusia (SDM)	7	-	3	10
3	Evaluasi (monitoring) terhadap SDM	9	-	1	10
<b>Jumlah</b>		20	6	4	30
<b>Rata-Rata</b>		7	2	1	10
<b>Skor</b>		60	18	12	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.13 dapat dilihat jawaban responden terkait pengendalian pada item penilaian 1 tentang pemantauan terhadap sumber daya manusia pada kategori

baik ada 4 responden yang menjawab dan pada kategori cukup baik sebanyak 6 responden. Kemudian pada item penilaian 2 tentang pengawasan terhadap sumber daya manusia pada kategori baik berjumlah 7 responden, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik, sementara pada kategori kurang baik berjumlah 3 responden yang menjawab. Selanjutnya untuk item penilaian 3 tentang evaluasi terhadap sumber daya manusia pada kategori baik berjumlah 9 responden, pada kategori cukup baik tidak ada yang menjawab dan pada kategori kurang baik 1 responden yang menjawab. Secara jumlah keseluruhan didapat skor 90 yang berada pada kategori baik. Artinya pemantauan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan ke pegawai maupun anggota satuan tugas BPBD sudah dilakukan dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator pengendalian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Pada saat monitoring tentunya kami membuat langkah disiplin kepada pegawai. Seperti melakukan apel pagi, absen wajib ya. Kami juga melakukan monitoring ke pegawai pada saat terjadinya kebakaran, turun langsung ke lokasi kejadian.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator pengendalian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Kami melakukan pengawasan ke anggota satuan tugas pada saat mereka turun ke lapangan mengatasi kebakaran lahan tersebut. Kami memonitoring langsung ke lokasi kejadian, apakah kerja mereka bagus atau tidak. Selama ini mereka melakukan pekerjaannya dengan baik pada saat dilapangan.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator pengendalian pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Sudah pasti kami ikut memonitor para anggota satuan tugas yang turun ke lapangan. Kami mengawasi setiap kerjanya. Alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik karena adanya kerjasama yang bagus di setiap regu.”*

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pengendalian (*controlling*) yang dilakukan oleh atasan ke para anggota satuan tugas sudah berjalan dengan baik dan para anggota satuan tugas juga sudah melakukan pekerjaannya dengan baik pada saat terjadinya kebakaran lahan. Jadi dalam indikator pengendalian ini berada dalam kategori baik.

#### **6. Pengawasan (*supervising*)**

Pengawasan berguna untuk memastikan bahwa aktivitas yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan standard organisasi. Pengawasan sangat penting didalam organisasi, karena dengan adanya pengawasan dapat mengetahui proses suatu kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Jika tidak dilakukannya pengawasan dengan baik tentunya tidak dapat menghasilkan tujuan yang memuaskan. Dengan demikian, proses pengawasan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh bari organisasi tersebut

untuk mencapai tujuannya. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini seperti memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan standard operasional prosedur dan standar pelayanan minimal. Karena 3 item penilaian ini sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan.

Kemudian adapun jawaban reponden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator pengawasan terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.14 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Pengawasan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	30	-	-	30
2	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	30	-	-	30
3	Memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya.	22	8	-	30
<b>Jumlah</b>		82	8	-	90
<b>Rata-Rata</b>		27	3	-	30
<b>Skor</b>		246	24	-	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.14 pada item penilaian 1 terkait Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 30 responden menjawab pada kategori baik, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik dan

kurang baik. Kemudian pada item penilaian 2 terkait Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kategori baik berjumlah 30 responden, tidak ada yang menjawab pada kategori cukup baik dan kurang baik. Selanjutnya pada item penilaian 3 terkait memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya, 22 responden menjawab pada kategori baik dan 8 responden menjawab pada kategori cukup baik. Secara keseluruhan didapat jumlah skor 270 yang berada pada kategori baik. Artinya pengawasan yang dilakukan atasan kepada anggota satuan tugas pada saat mengatasi kebakaran lahan dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku.

Selanjutnya dari penyebaran kuesioner terdapat jawaban responden dari masyarakat Kota Pekanbaru terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.15 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pengawasan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	-	-	10
2	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1	9	-	10
3	Memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya.	10	-	-	10
<b>Jumlah</b>		21	9	-	30
<b>Rata-Rata</b>		7	3	-	10
<b>Skor</b>		63	27	-	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Pada tabel V.15 yang telah dipaparkan diatas, pada item penilaian 1 mengenai pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pada kategori baik berjumlah 10 responden yang menjawab, tidak ada jawaban untuk kategori cukup baik dan kurang baik. Artinya mereka sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian pada item penilaian 2 mengenai pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada kategori baik 1 responden yang menjawab dan pada kategori cukup baik 9 responden yang menjawab. Selanjutnya pada item penilaian 3 mengenai memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya pada kategori baik berjumlah 10 responden yang menjawab, pada kategori cukup baik dan kurang baik tidak ada jawaban dari responden. Dari keseluruhan jawaban reponden didapat skor tertinggi 90 yang berada pada kategori baik.

Kemudian didapat hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator pengawasan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Pada saat melaksanakan tugasnya respon dari pegawai sangat baik, sehingga mereka bekerja dengan baik pada saat mengatasi kebakaran lahan tersebut. Kami juga melakukan pengawasan pada saat anggota stuan tugas melakukan pekerjaannya.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator pengawasan pada strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Tentunya kami bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan. Apabila tidak bekerja sesuai dengan SOP tersebut, pekerjaan yang kami lakukan tidak akan maksimal. Para anggota pun bekerja dengan baik dalam pengawasan. Tidak ada kata tidak siap, karena bencana itu bisa terjadi kapan saja.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator pengawasan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Pastinya setiap instansi selalu bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, begitu juga dengan BPBD ini. Semua pegawai atau sumber daya manusia yang ada di kantor ini bekerja dengan baik dalam pengawasan kami.”*

Dari ketiga hasil kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam indikator pengawasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai sudah dilakukan dengan baik dan pegawai yang bekerja pun sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam pengawasan yang dilakukan oleh atasan. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa indikator pengawasan ini berada pada kategori baik sesuai hasil yang didapatkan.

### **7. Penganggaran (*budgeting*)**

Penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka. Anggaran seringkali disebut sebagai rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati proses penting

dalam arti sebagai kegiatan yang akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisien dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Dengan penyusunan anggaran tujuan organisasi itu akan tercapai. Maka dari itu pangaanggaran sangat penting dalam menjalankan kegiatan di suatu organisasi.

Penganggaran yang dimaksud didalam penelitian ini seperti ketersediaan dana, pengeluaran dana dan dana yang diperoleh. Karena ketiga item penilaian ini sangat mempengaruhi dalam mengatasi kebakaran lahan.

Kemudian jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator penganggaran terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.16 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Penganggaran pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketersediaan dana	15	15	-	30
2	Pengeluaran dana	3	27	-	30
3	Dana yang diperoleh	21	9	-	30
<b>Jumlah</b>		39	51	-	90
<b>Rata-Rata</b>		13	17	-	30
<b>Skor</b>		117	153	-	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Pada tabel V.16 untuk item penilaian 1 terkait ketersediaan dana 15 responden menjawab pada kategori baik dan 15 responden menjawab pada

kategori cukup baik. Kemudian untuk item penilaian 2 terkait pengeluaran dana 3 responden menjawab baik dan 27 responden menjawab cukup baik. Hal ini karena anggota satuan tugas tidak sepenuhnya mengetahui pengeluaran dana yang dilakukan, sebab anggaran dilakukan oleh seksi keuangan. Selanjutnya untuk item penilaian 3 terkait dana yang diperoleh pada kategori baik berjumlah 21 responden yang menjawab dan pada kategori cukup baik berjumlah 9 responden. Secara keseluruhan tetap didapat skor tertinggi 270 yang berada pada kategori baik terkait indikator penganggaran.

Kemudian adapun jawaban penyebaran kuesioner dari responden masyarakat Kota Pekanbaru terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.17 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Penganggaran pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketersediaan dana	7	3	-	10
2	Pengeluaran dana	2	8	-	10
3	Dana yang diperoleh	7	-	3	10
<b>Jumlah</b>		16	11	3	30
<b>Rata-Rata</b>		5	4	1	10
<b>Skor</b>		48	33	9	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.17 pada item penilaian 1 terkait ketersediaan dana pada kategori baik berjumlah 7 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 3

responden. Kemudian untuk item penilaian 2 terkait pengeluaran dana pada kategori baik berjumlah 2 responden dan 8 responden pada kategori cukup baik. Selanjutnya untuk item penilaian 3 terkait dana yang diperoleh pada kategori baik berjumlah 7 responden, pada kategori cukup tidak ada responden yang menjawab, dan pada kategori kurang baik berjumlah 3 responden. Artinya masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui pengeluaran dana yang dilakukan oleh BPBD dan dana yang diperoleh cukup atau tidaknya. Akan tetapi total keseluruhan skor yang didapat 90 berada pada kategori baik, dilihat dari jumlah keseluruhan jawaban.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator penganggaran pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Ketersediaan dana di BPBD ini cukup ya, pengeluarannya juga dilakukan dengan baik. Dana yang kami peroleh dari APBD pun dicukup-cukup kan untuk mengatasi permasalahan ini. Hanya saja masyarakat kadang membantu memberikan makanan dan minuman ke petugas yang sedang mengatasi kebakaran yang terjadi. Itu saja, secara keseluruhan semuanya dilakukan dengan baik.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator penganggaran pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Penganggaran memang tugasnya bagian keuangan ya, tapi secara keseluruhan untuk dana yang kami peroleh, pengeluarannya dan ketersediaan dana di BPBD ini sudah dilakukan dengan baik oleh bidang keuangan itu sendiri.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator penganggaran pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Mulai dari ketersediaan dana, pengeluaran dana dan dana yang diperoleh, bidang keuangan sudah melakukan tugasnya dengan baik terkait penganggaran ini, anggaran ini memang dikhususkan untuk mengatasi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Semuanya sudah dilakukan dengan baik.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penganggaran yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari ketersediaan dana, pengeluaran dana dan dana yang diperoleh sudah dilakukan dengan baik oleh bidang keuangan. Jadi pada indikator keuangan masuk dalam kategori baik.

#### **8. Keuangan (*financing*)**

Keuangan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk menentukan cara yang efektif dalam melakukan suatu pendanaan ataupun pemanfaatan dana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Keuangan yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu sumber dana, pengelolaan keuangan dan instansi yang membantu terkait keuangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

mengatasi kebakaran lahan di Kota Pekanbaru. Karena ketiga item tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi.

Kemudian jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator keuangan terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.18 : Distribusi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas Terhadap Indikator Keuangan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sumber dana	25	5	-	30
2	Pengelolaan keuangan	29	-	1	30
3	Instansi yang membantu terkait keuangan	-	-	30	30
<b>Jumlah</b>		54	5	31	90
<b>Rata-Rata</b>		18	2	10	30
<b>Skor</b>		162	15	93	270
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.18 pada item penilaian 1 terkait sumber dana pada kategori baik berjumlah 25 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 5 responden yang beranggapan bahwa sumber dana yang diterima BPBD baik yang berasal dari APBD. Kemudian pada item penilaian 2 terkait pengelolaan keuangan pada kategori baik berjumlah 29 responden yang menjawab dan 1 responden yang menjawab pada kategori cukup baik. Artinya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bidang keuangan dilakukan dengan baik. Selanjutnya pada item penilaian 3 terkait instansi yang membantu terkait

keuangan pada kategori baik dan cukup baik tidak ada jawaban responden, sementara pada kategori kurang baik berjumlah 30 responden yang menjawab. Artinya tidak ada instansi luar organisasi yang ikut membantu terkait keuangan untuk mengatasi masalah kebakaran lahan. Semuanya berasal dari APBD Provinsi.

Kemudian adapun jawaban penyebaran kuesioner dari responden masyarakat Kota Pekanbaru terkait indikator keuangan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel V.19 : Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Indikator Keuangan pada Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sumber dana	5	5	-	10
2	Pengelolaan keuangan	6	-	4	10
3	Intansi yang membantu terkait keuangan	-	-	10	10
<b>Jumlah</b>		11	5	14	30
<b>Rata-Rata</b>		4	1	5	10
<b>Skor</b>		33	15	42	90
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.*

Dari tabel V.19 pada item penilaian 1 terkait sumber dana yang menjawab pada kategori baik berjumlah 5 responden dan pada kategori cukup baik berjumlah 5 responden, tidak ada jawaban untuk kategori kurang baik. Kemudian untuk item penilaian 2 terkait pengelolaan keuangan pada kategori baik

berjumlah 6 responden, pada kategori cukup baik tidak ada yang menjawab dan pada kategori kurang baik berjumlah 4 responden yang beranggapan bahwa masyarakat tidak mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPBD. Selanjutnya pada item penilaian 3 mengenai instansi yang membantu terkait keuangan, responden yang menjawab pada kategori baik dan cukup baik tidak ada, sementara yang menjawab pada kategori kurang baik berjumlah 10 responden. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat mengetahui tidak ada instansi yang membantu terkait keuangan. Dari total keseluruhan didapat skor 90 masuk dalam kategori baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait indikator keuangan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Ibu Eli Farsya, SH.,MH yaitu sebagai berikut :

*“Sumber dana semuanya berasal dari APBD Provinsi. Pengelolaannya juga dilakukan dengan baik oleh bidang keuangan sendiri. Tidak ada instansi lain yang membantu terkait keuangan, semuanya dari APBD.”*

Kemudian dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik terkait indikator keuangan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Yunaldi Santiago SH.,MM yaitu sebagai berikut :

*“Tidak ada instansi dari luar organisasi yang terlibat membantu masalah keuangan, semuanya itu berasal dari APBD. Instansi luar hanya membantu di fasilitas. Dana tersebut dikelola oleh bidang keuangan yang ada di BPBD dengan sebaik mungkin.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait indikator keuangan pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan di Kota Pekanbaru oleh Bapak Alan Kurnia, S.STP yaitu sebagai berikut :

*“Sumber dana untuk mengatasi kebakaran lahan ini semuanya dari APBD tidak ada dari instansi luar. Bagian keuanganlah yang mengelola dana tersebut dengan baik.”*

Dari hasil wawancara ketiga kepala bidang diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan yang didapat untuk menangani masalah kebakaran lahan ini semuanya berasal dari APBD Provinsi. Bidang keuangan lah yang nantinya akan mengelola dana sebaik mungkin. Tidak ada instansi dari luar organisasi yang ikut membantu terkait masalah keuangan. Mereka hanya membantu fasilitas saja. Jadi untuk indikator keuangan ini berada pada kategori baik sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan.

### **C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil dari peneliti penelitian yang telah dilakukan disetiap indikator yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Kepemimpinan (*directing*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*), Pengawasan (*supervising*), Penganggaran (*budgeting*), dan Keuangan (*financing*) dari observasi yang

dilakukan peneliti di lapangan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Anggota Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan beberapa masyarakat Kota Pekanbaru melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru, maka peneliti menarik kesimpulan dengan membuat rekapitulasi dari ke delapan indikator penilaian pada penelitian ini.

Berikut ini rekapitulasi jawaban dari anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijawab melalui kuesioner yang telah dibagikan peneliti mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru yang dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel V.20 : Rekapitulasi Jawaban Responden Anggota Satuan Tugas BPBD Tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.**

No	Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Total
1	Perencanaan	15 (135)	15 (135)	-	30 (270)
2	Pengorganisasian	25 (222)	5 (48)	-	30 (270)
3	Kepemimpinan	22 (201)	8 (69)	-	30 (270)
4	Pengkoordinasian	22 (201)	8 (69)	-	30 (270)
5	Pengendalian	25 (222)	5 (48)	-	30 (270)
6	Pengawasan	27 (246)	3 (24)	-	30 (270)

7	Penganggaran	13 (117)	17 (153)	-	30 (270)
8	Keuangan	18 (162)	2 (15)	10 (93)	30 (270)
<b>Jumlah</b>		167	63	10	240
<b>Skor</b>		1.506	561	93	2.160
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel V.20 yaitu rekapitulasi pada seluruh indikator dari jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan, dari ke delapan indikator tersebut didapat pada kategori baik diperoleh skor 1.506, cukup baik diperoleh skor 561 dan kurang baik diperoleh skor 93. Sehingga total skor keseluruhan dari delapan indikator oleh responden anggota satuan tugas diperoleh hasil skor 2.160, yang mana sesuai dengan penjelasan pada Bab II bahwa jika jawaban responden anggota satuan tugas berada pada rentang 1.680-2.160 maka masuk pada kategori baik. Maka menurut anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, strategi menanggulangi masalah kebakaran lahan ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik meskipun terkadang masih terdapat kendala pada saat mengatasi kebakaran lahan yang terjadi, seperti kendala jalan yang menyulitkan petugas ketika membawa peralatan pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran yang letaknya sangat jauh ke pedalaman dikarenakan susah untuk dilewati oleh kendaraan sehingga membuat anggota harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat lokasi kejadian, begitu juga dengan letak sumber air yang sangat jauh sehingga menyulitkan petugas dalam memadamkan api.

Selanjutnya yaitu tabel rekapitulasi dari responden masyarakat Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.21 : Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru.**

No	Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Total
1	Perencanaan	4 (39)	6 (51)	-	10 (90)
2	Pengorganisasian	9 (84)	1 (6)	-	10 (90)
3	Kepemimpinan	3 (30)	5 (39)	-	10 (90)
4	Pengkoordinasian	3 (30)	7 (60)	-	10 (90)
5	Pengendalian	7 (60)	2 (18)	-	10 (90)
6	Pengawasan	7 (63)	3 (27)	-	10 (90)
7	Penganggaran	5 (48)	4 (33)	-	10 (90)
8	Keuangan	4 (33)	1 (15)	10 (93)	10 (90)
<b>Jumlah</b>		42	29	10	80
<b>Skor</b>		387	249	93	720
<b>Kategori</b>		<b>Baik</b>			

*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.*

Dari tabel V.21 terdapat rekapitulasi seluruh indikator dari jawaban responden masyarakat Kota Pekanbaru terkait strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan, dari ke delapan indikator didapat pada kategori baik diperoleh skor 387, pada kategori cukup baik diperoleh skor 249, dan pada kategori kurang baik diperoleh skor 93. Sehingga

dari ke delapan indikator tersebut total skor keseluruhan dari responden masyarakat Kota Pekanbaru diperoleh hasil 720, yang mana sesuai dengan penjelasan Bab II jika jawaban responden masyarakat Kota Pekanbaru berada pada rentang 560-720 termasuk pada kategori baik.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru**

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik oleh instansi yang terkait, namun adapun faktor penyebab yang masih menimbulkan terjadinya kebakaran lahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor alami.

Faktor alami yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kebakaran lahan karena kondisi iklim dapat memengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar tingkat permukaan, banyaknya oksigen yang ada dan kecepatan penyebaran api.

2. Faktor penyebab kebakaran yang dilakukan oleh manusia yaitu adanya konversi lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain, pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak terkendali, seperti pembukaan perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat dan pembakaran untuk menunjukkan penguasaan lahan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari delapan indikator yang sudah dijelaskan pada Bab V diatas sudah dikatakan baik. Dilihat dari fenomena yang

terjadi, strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih kurang sehingga masih adanya kebakaran lahan yang terjadi, seperti kurangnya edukasi yang diberikan oleh BPBD kepada masyarakat mengenai kebakaran lahan. Di samping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga seringkali menghimbau kepada masyarakat melalui penyebaran brosur, pamflet, baliho, bahkan penyuluhan langsung untuk tidak membakar lahan sembarangan. Namun masih ada saja faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan ini akibat ulah manusia yang membuka lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara pembakaran. Selain itu cuaca yang ekstrim sering juga menyebabkan pemicu kebakaran, terutama lahan gambut yang mudah terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan baik, kembali lagi ke masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan himbauan yang diberikan sehingga terkadang kebakaran lahan ini masih terjadi.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

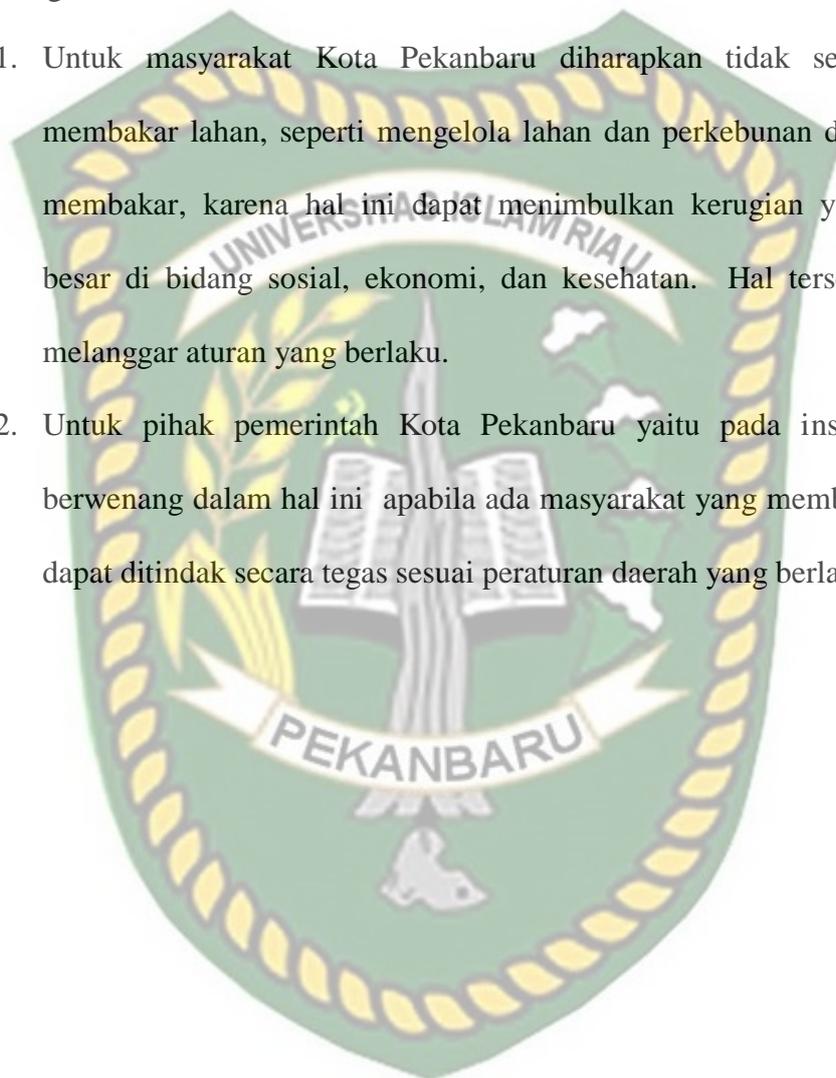
Dari hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan jawaban responden anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari delapan indikator tersebut didapat total skor keseluruhan yaitu 2.160 yang berada pada kategori baik, artinya strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik walaupun masih belum efektif seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan, seharusnya pihak BPBD melakukan sosialisasi secara rutin agar masyarakat mengerti akan dampak kebakaran lahan jika mereka melakukannya. Kemudian berdasarkan jawaban responden masyarakat Kota Pekanbaru dari delapan indikator tersebut diperoleh total skor keseluruhan yaitu 720 yang berada ada pada kategori baik, artinya strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara masyarakat, instansi luar organisasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dari keseluruhan hasil yang didapatkan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan tidak sembarangan membakar lahan, seperti mengelola lahan dan perkebunan dengan cara membakar, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Hal tersebut sudah melanggar aturan yang berlaku.
2. Untuk pihak pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pada instansi yang berwenang dalam hal ini apabila ada masyarakat yang membakar lahan dapat ditindak secara tegas sesuai peraturan daerah yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Anies. 2018. *Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- David R. Fred. 2010. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta. Salemba Empat.
- Donni Juni Priansa & Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Fao. 1987. *Masyarakat Desa Sekitar Hutan*. Bandung: Bumi Aksara..
- Fitriana, Rina. 2008. *Mengenal Hutan*. Bandung: PUTRA SETIA.
- Hamim, Sufian. dkk. 2019. *Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru. UIR Press.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara Prahasta.
- Hasibuan, Malayu. SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Penerbit: Bumi Aksara.
- Jatmiko. 2003. *Manajemen Strategi*. Malang: UMM Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mathis, Robert L. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Noor, Djauhari. 2006. *Geologi Lingkungan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarnayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjamsuddin indradadi, Sjamjiar. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sthepen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.

- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Syafiie, Kencana Inu. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Tarmizi Yussa, Hendry Andry. 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Umar, H. 2001. *Strategic Management in Action*, Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis *Strategic Business Unit* Berdasarkan Konsep R. Porter, Fred R. David, dan Wheelan Hunger. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf Burhanudin & Rianto Nur. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Fisipol UIR.
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru. Publishing Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli & Moris A. Yogya. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

#### **Jurnal Online :**

- Dimas, dkk. 2015. *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Di Jeng Solo)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 29 No.1. [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)
- Pane, Lena Dewinta. *Strategi SAMSAT Dalam Meningkatkan Masyarakat Taat Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang tahun 2017*.
- Desky, Fitria. 2019. *Strategi Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero)Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh Unit Layanan Pelanggan (ULP) Merduati Kota*.

Hamim, Sufian. 2019. *Strategi Planning Innovation Of Rural Development In Riau Province, Indonesia. IJICC. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, Pekanbaru.*

Hasibuan, Suci Rahmadani. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau.* 2015.

Munjiyah, Siti. *Pengaruh Sistem Penggunaan Lahan Hutan Terhadap Diversitas Makrointervebrata Tanah di RPH Jatijero, Kediri, Jawa Timur.*

Romi dan Kariaman. *Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Serdang Bedagai.* 2019.

### **B. Skripsi**

Anwar, Musyadad. 2015. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak.*

Fitra Haris. 2011. *Tanggap Darurat Bencana (Studi Kasus: Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Merapi Kabupaten Sleman Tahun 2010).* Universitas Indonesia.

### **C. Dokumentasi**

1. Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017.
4. Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : MAK/01/XII/2019 Tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan